



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Badan Pendapatan Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5),
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 29);
13. Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 372 Tahun 2021 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 373 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Peta Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
2. Peta Proses Bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.
3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.
4. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili pada tanggal 03 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



/k Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700814 200212 1 006

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

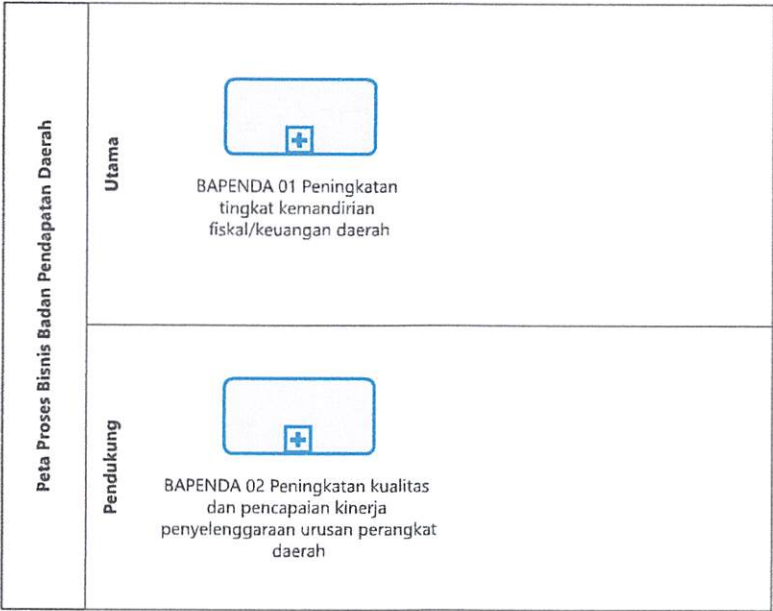
1. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur.
2. Kepala BAPELITBANGDA Kab. Luwu Timur.
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur.
4. Kepala BKPSDM Kab.Luwu Timur.
5. kepala Bagian Organisasi Setda Kab Luwu Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022-2026

PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022-2026

Bagan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

LEVEL 0 : SASARAN STRATEGIS



LEVEL 1 : PROGRAM

Bapenda 01 Peningkatan tingkat kemandirian fiskal/keuangan daerah	 BAPENDA 01 01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
--	---

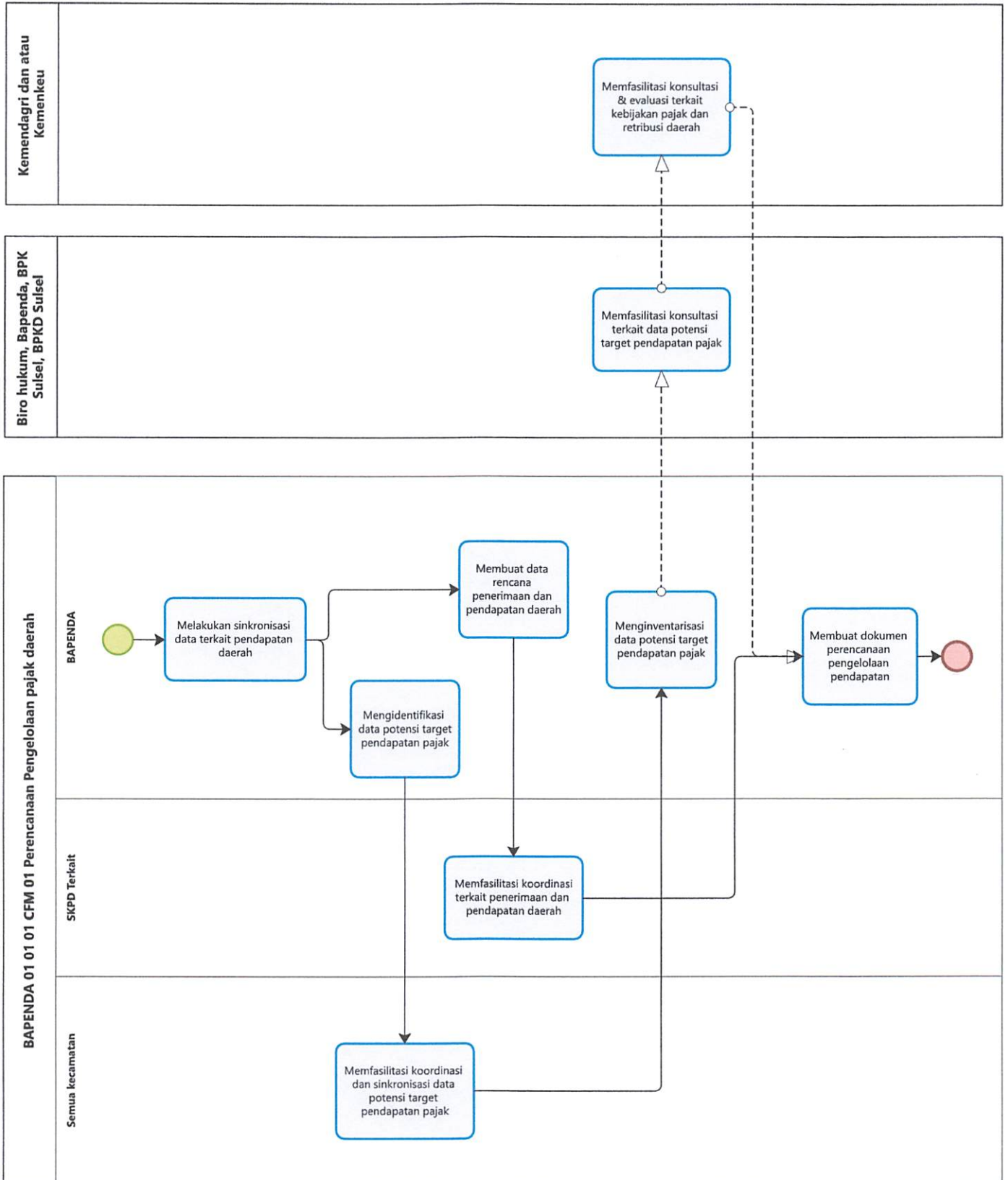
Bapenda 02 Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	 BAPENDA 02 01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
---	--

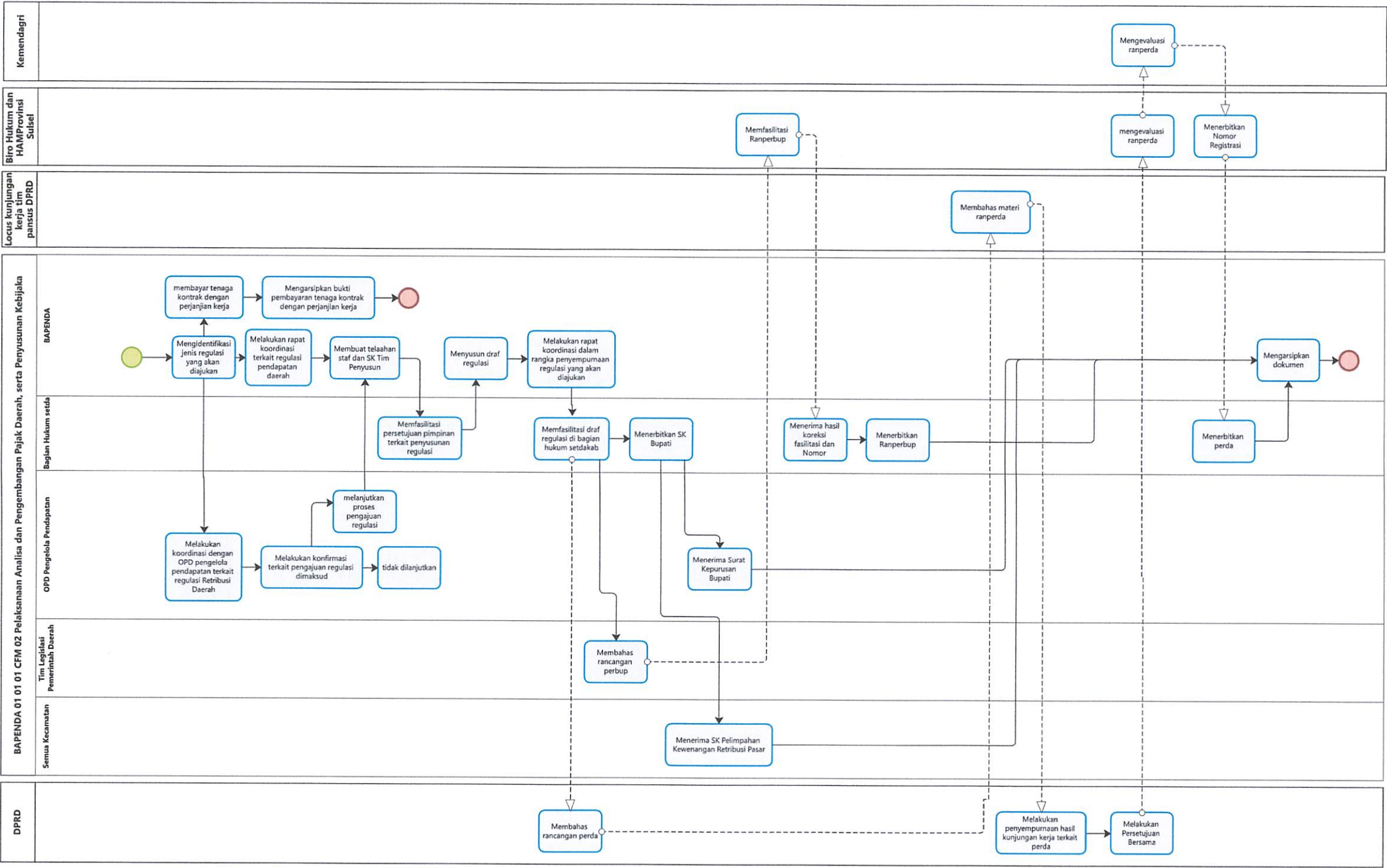
LEVEL 2 : KEGIATAN

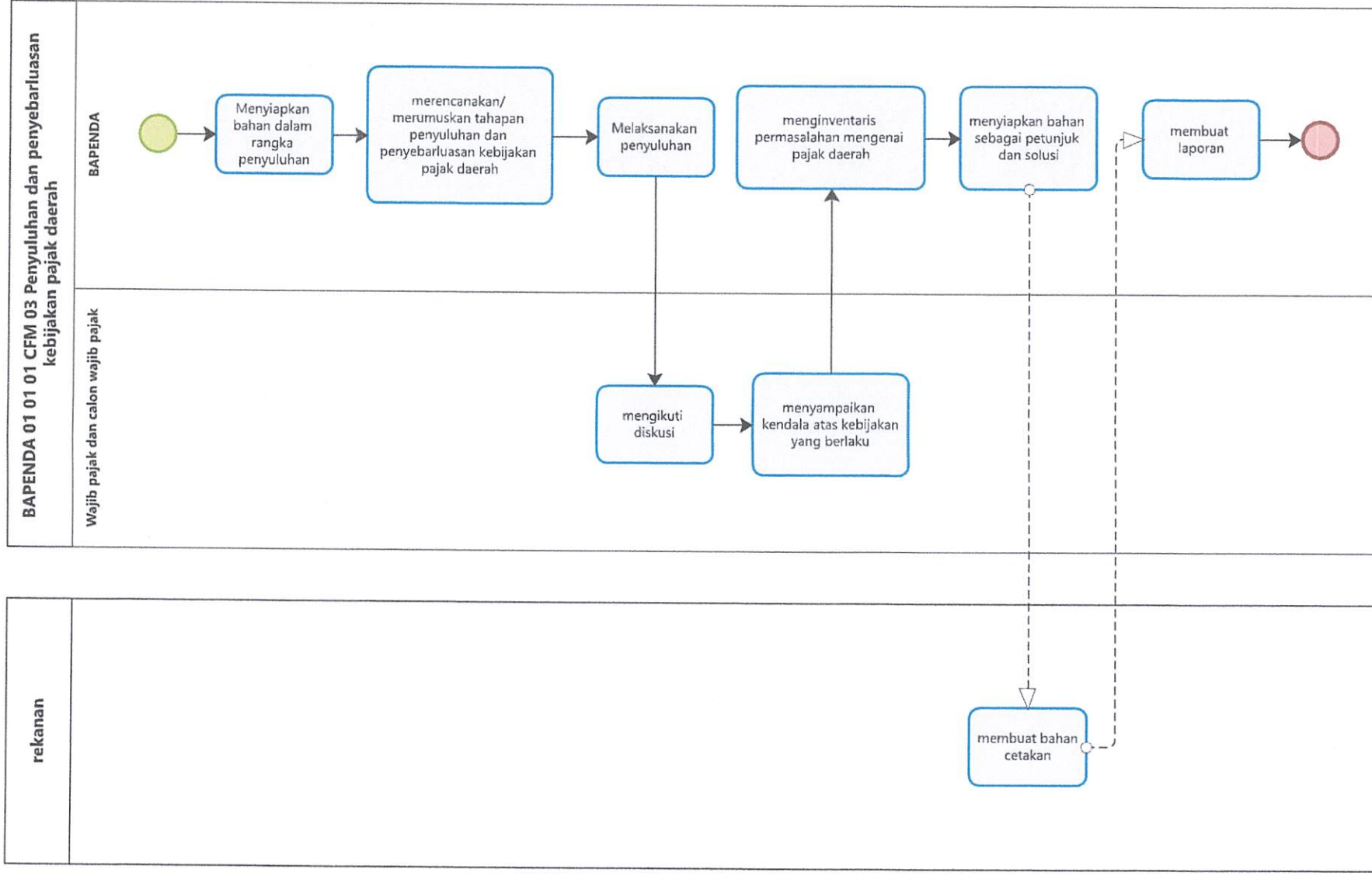
BAPENDA 01 01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA 01 01 01 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
---	--

BAPENDA 02 01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	BAPENDA 02 01 01 Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA 02 01 02 Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA 02 01 03 Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			
	BAPENDA 02 01 04 Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BAPENDA 02 01 05 Pengadministrasian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA 02 01 06 Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah
			
	BAPENDA 02 01 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA 02 01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA 02 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (Cross Functional Map)

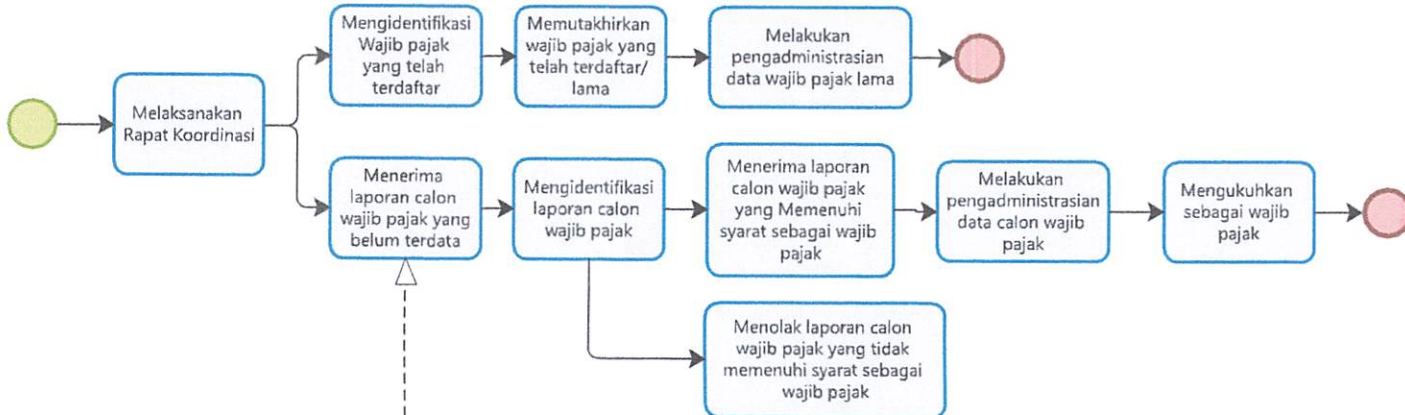




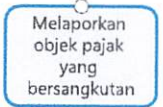


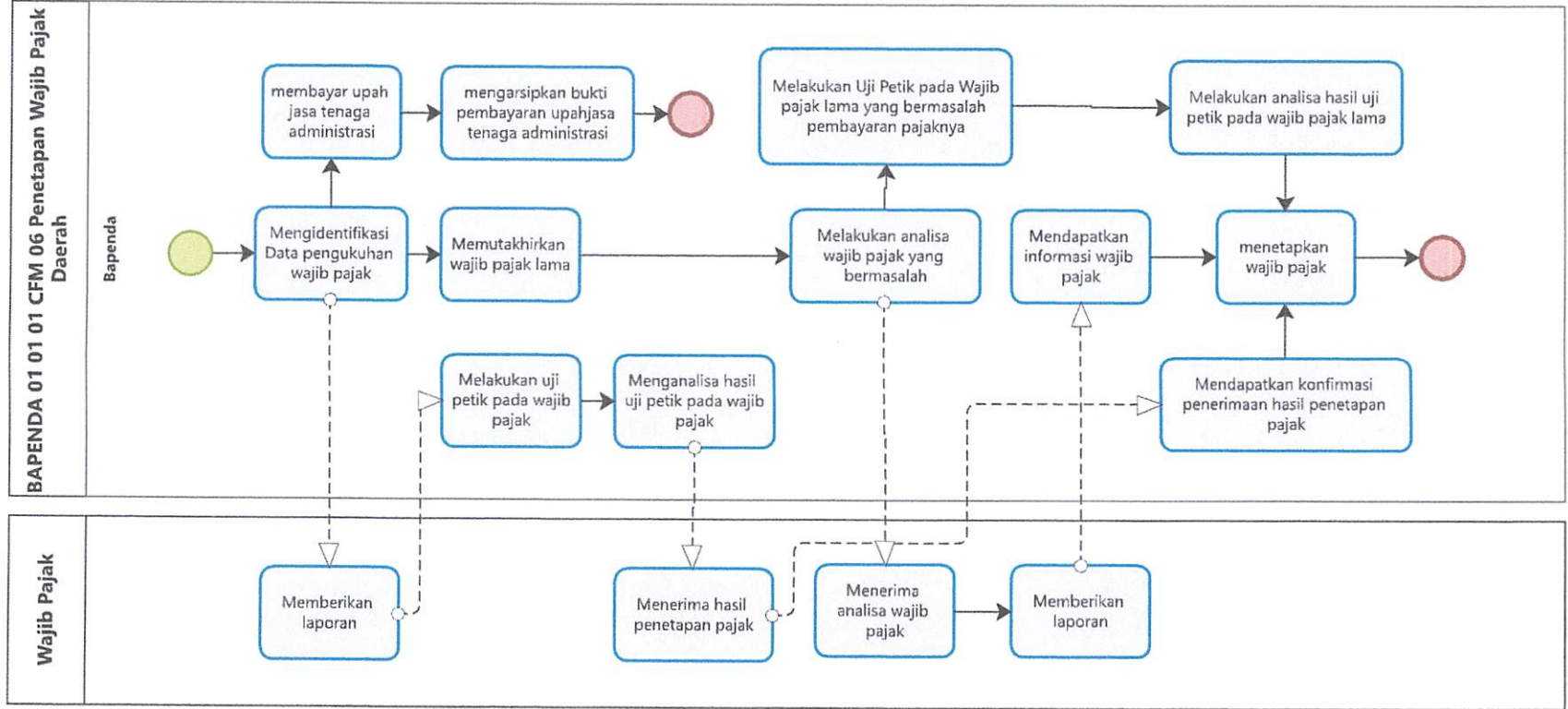
BAPENDA 01 01 01 CFM 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

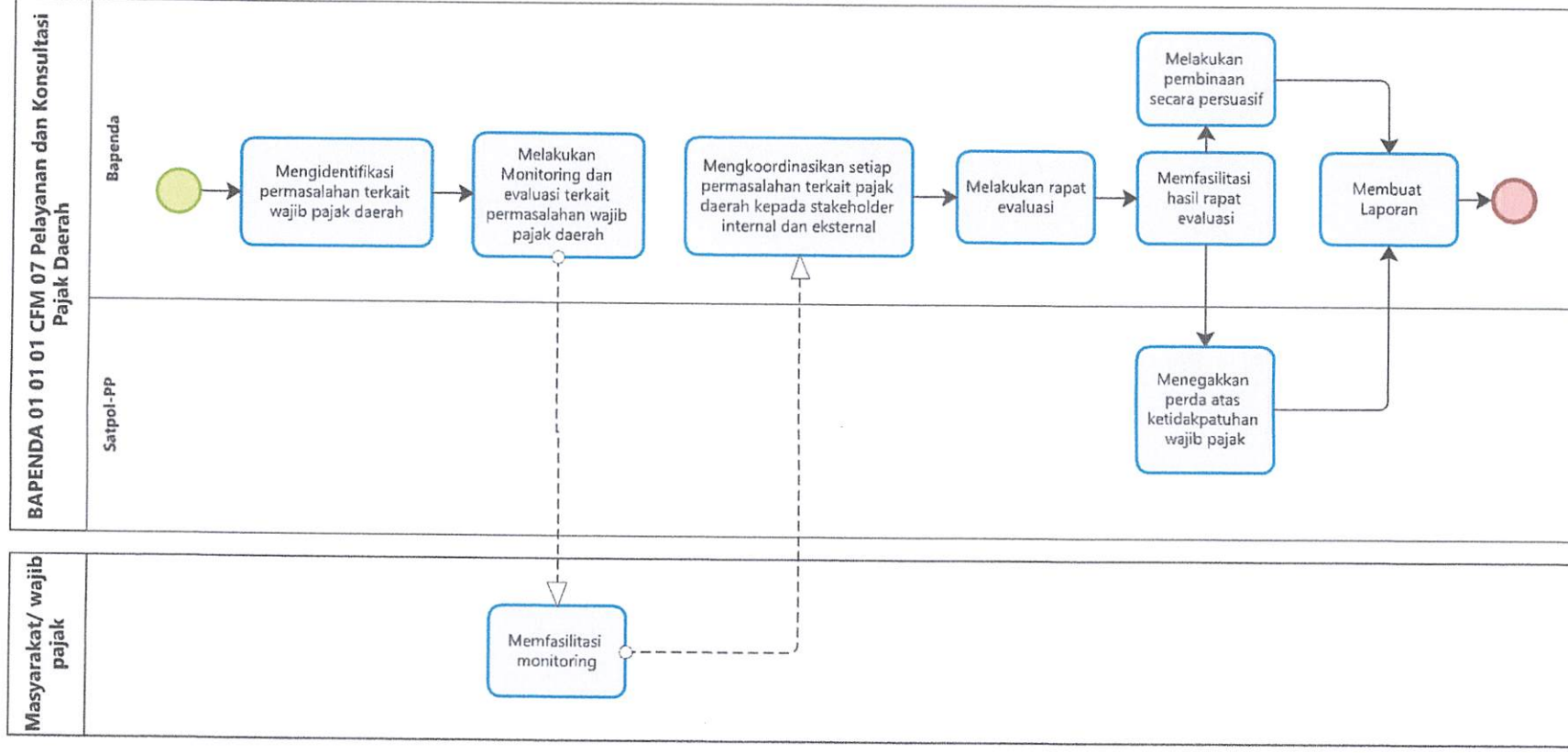
BAPENDA

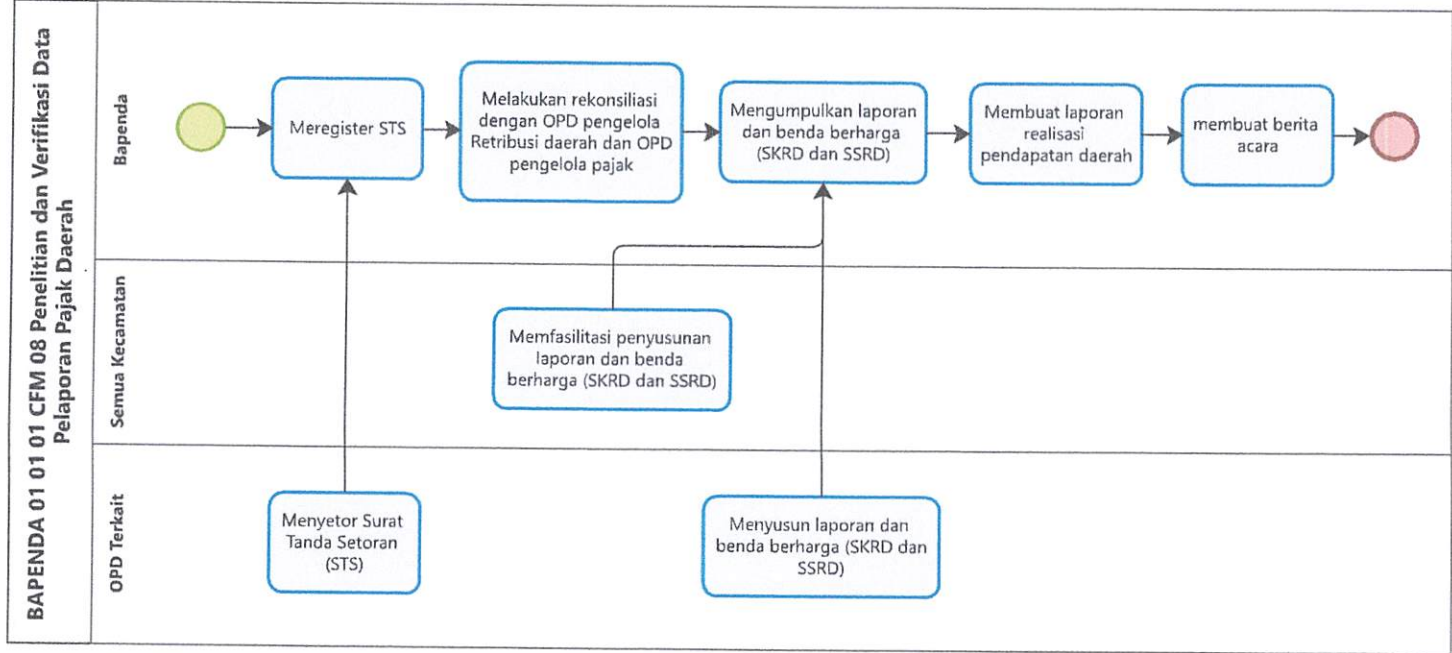


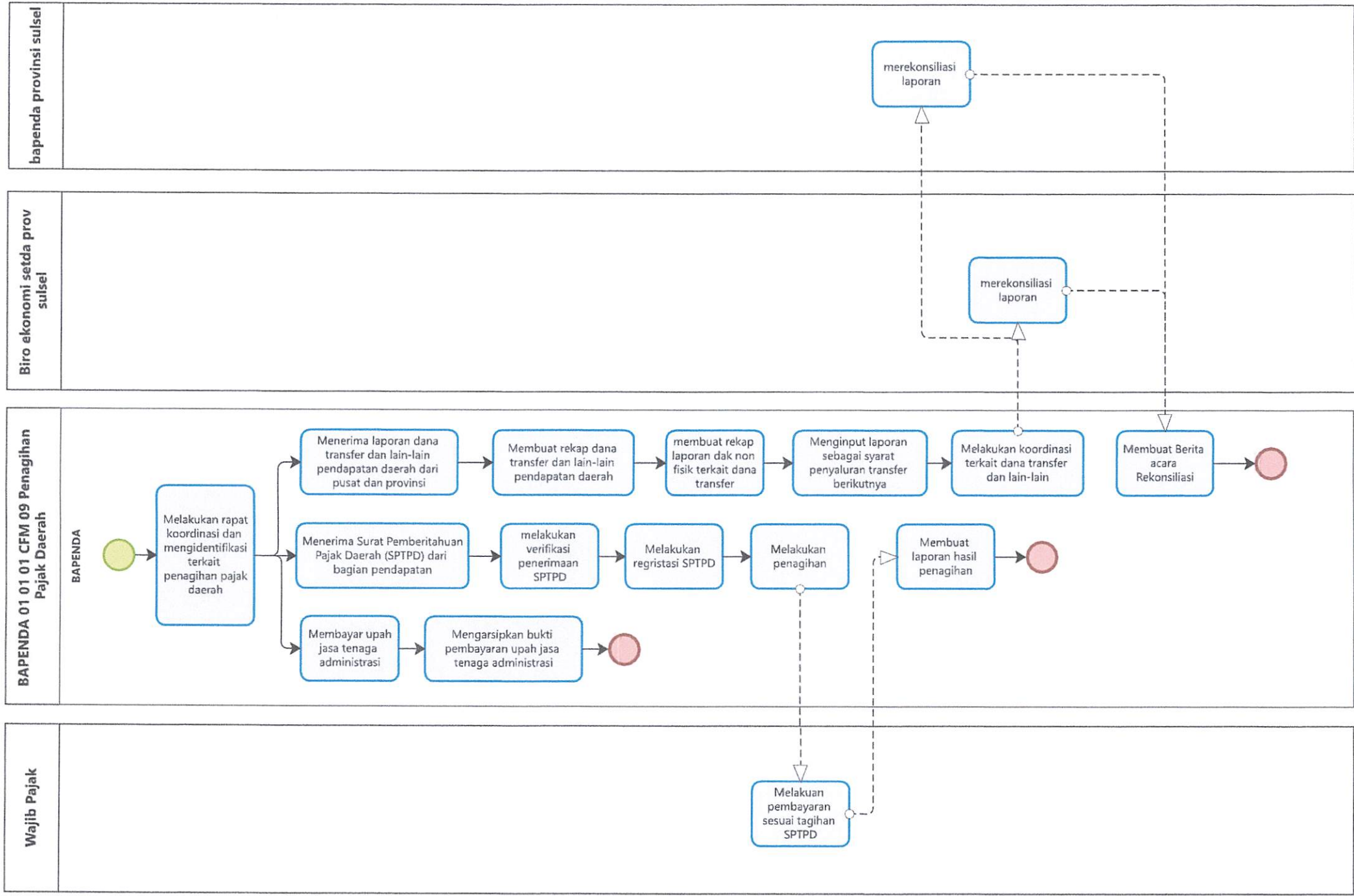
Calon Wajib Pajak









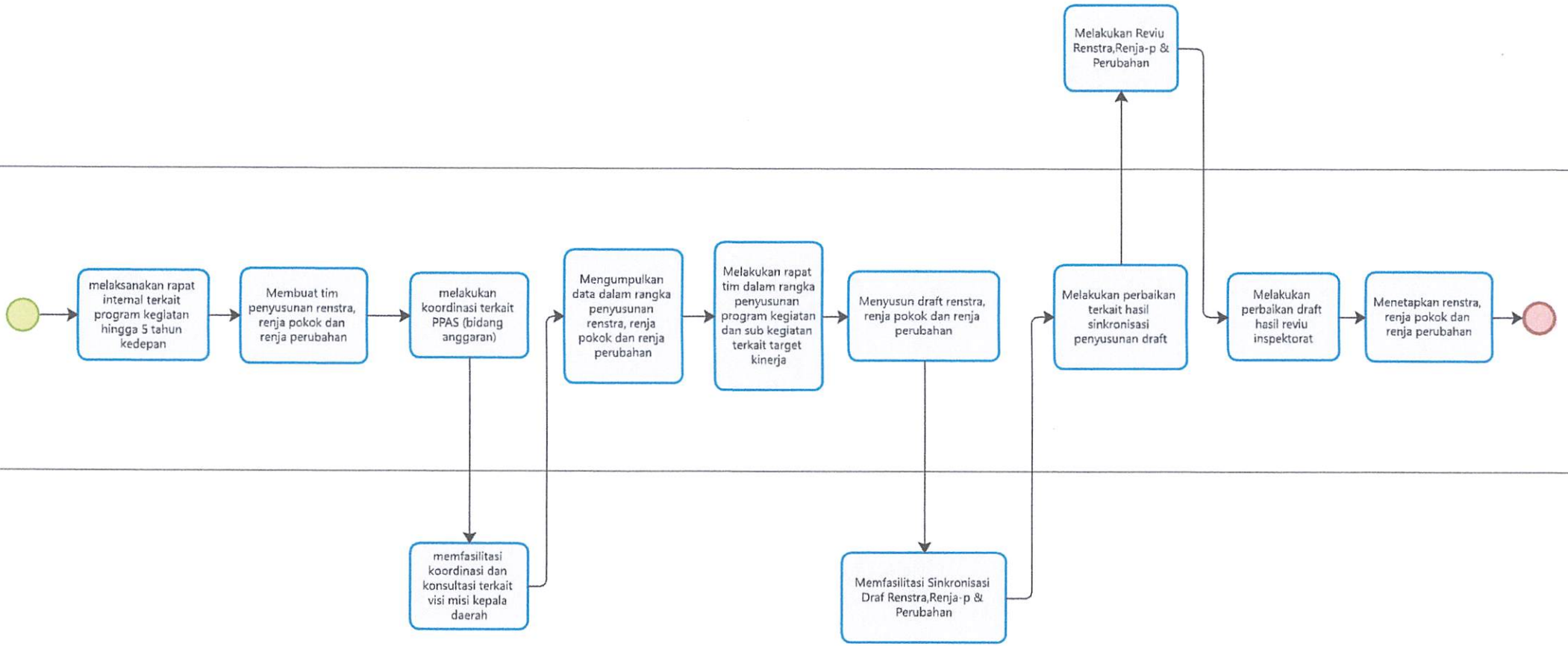


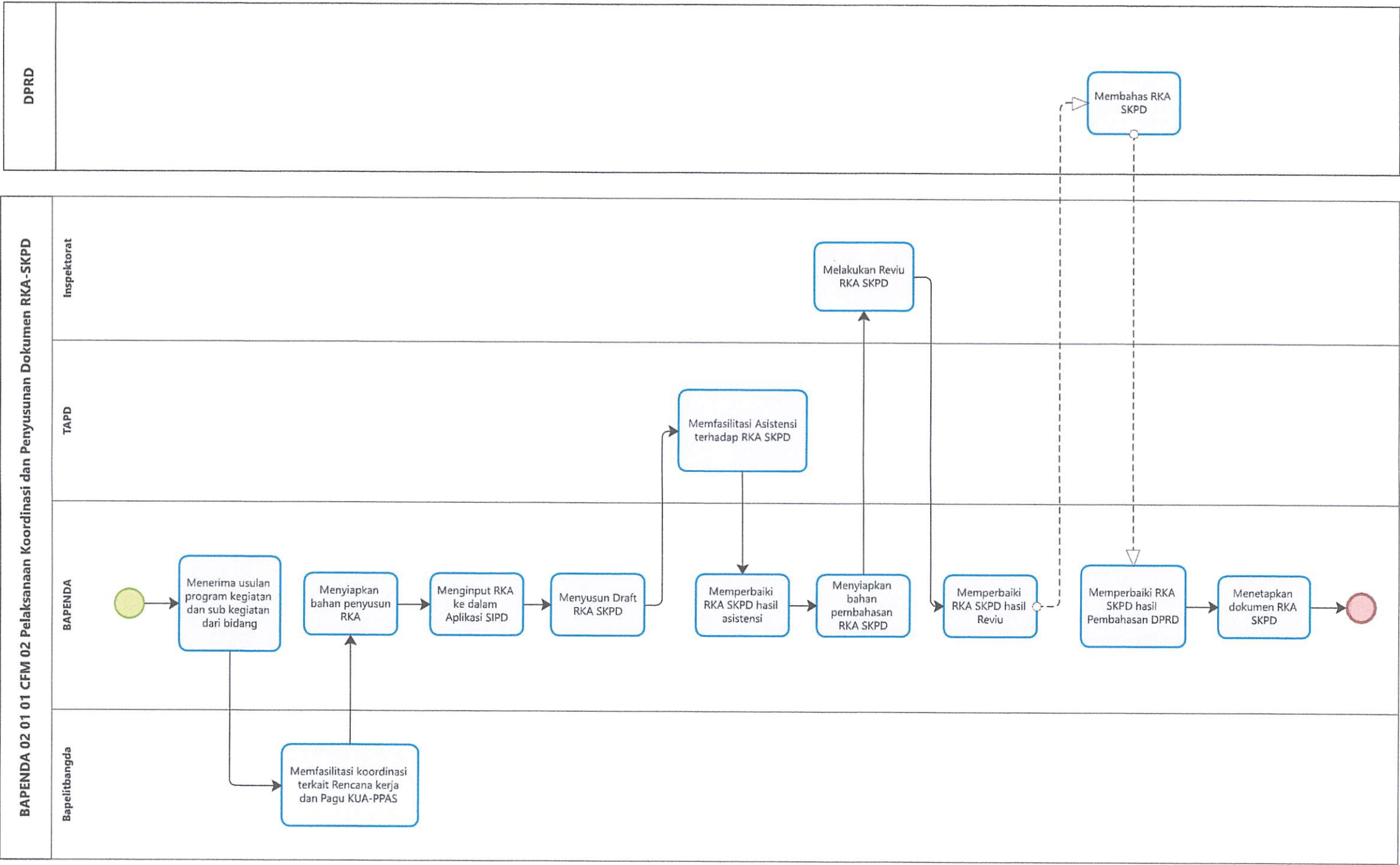
BAPENDA 02 01 01 CFM 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

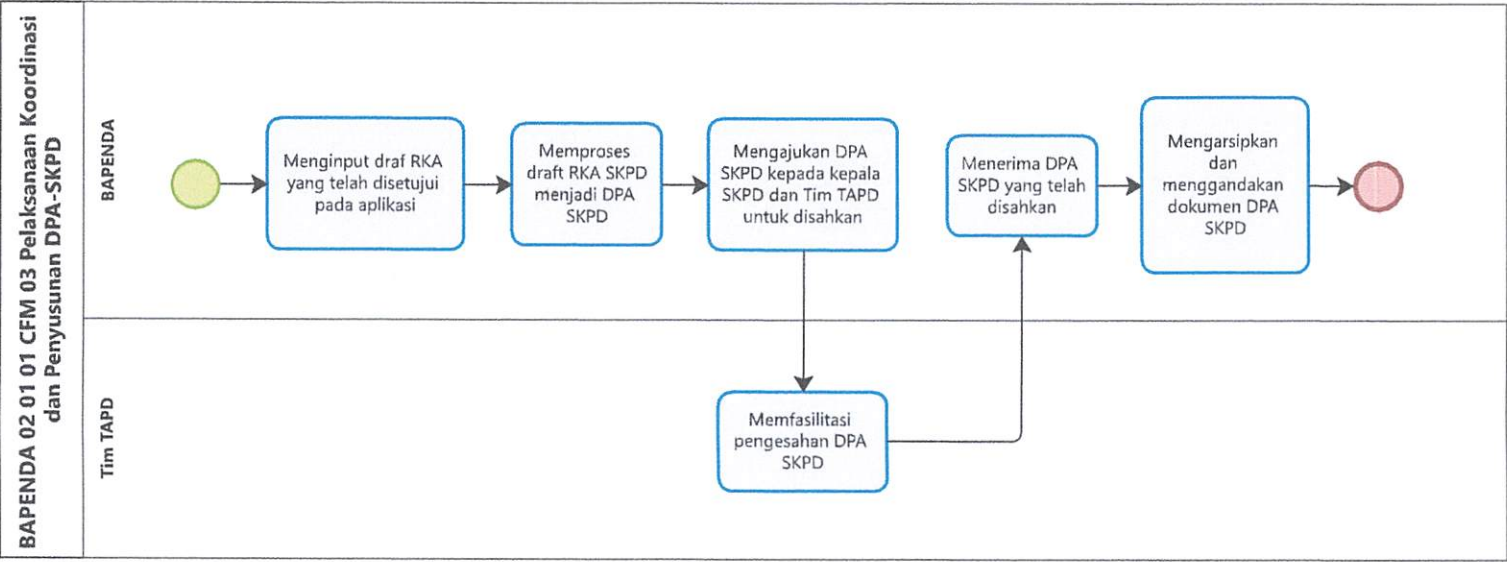
Inspektorat

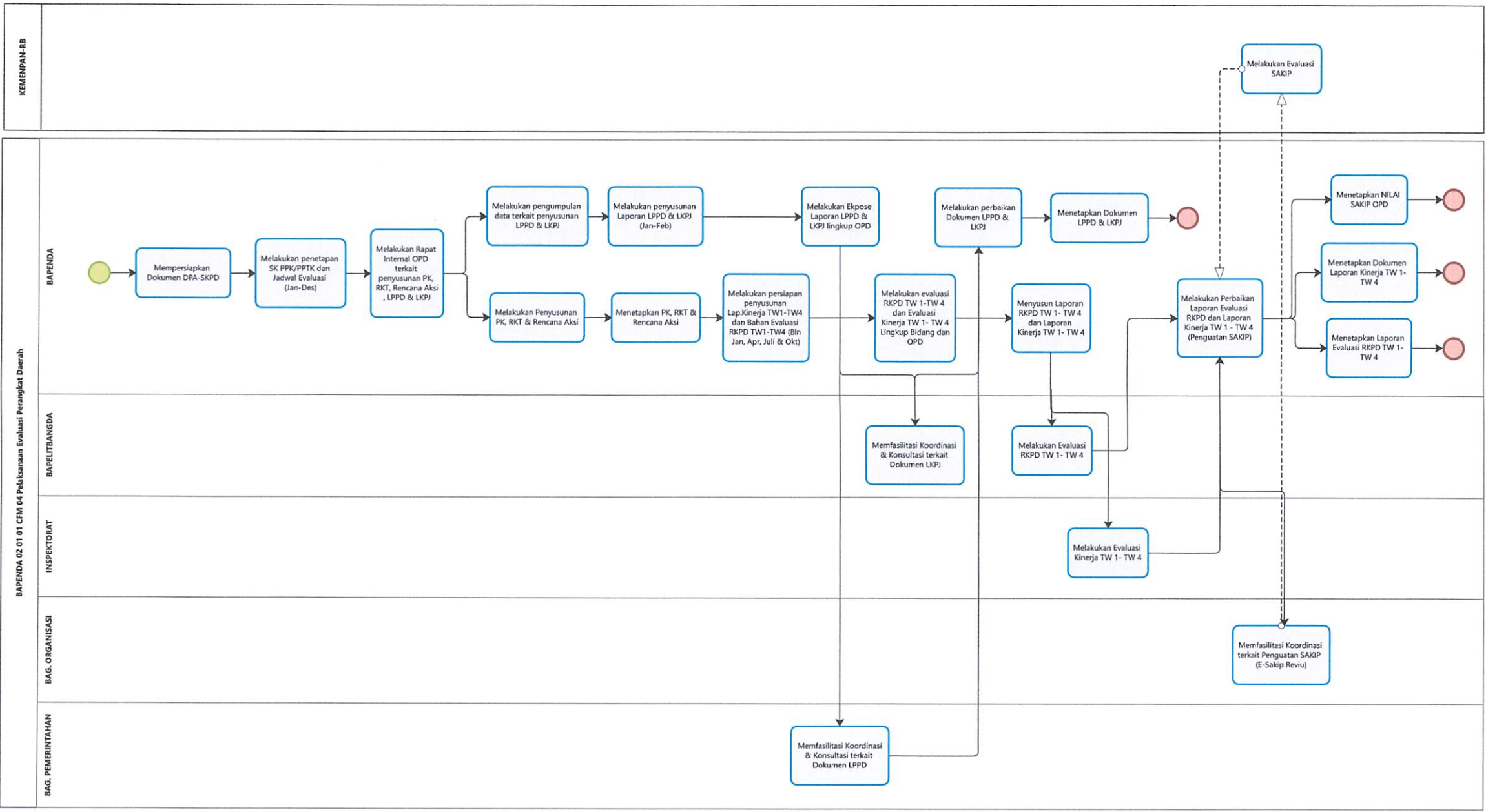
BAPENDA

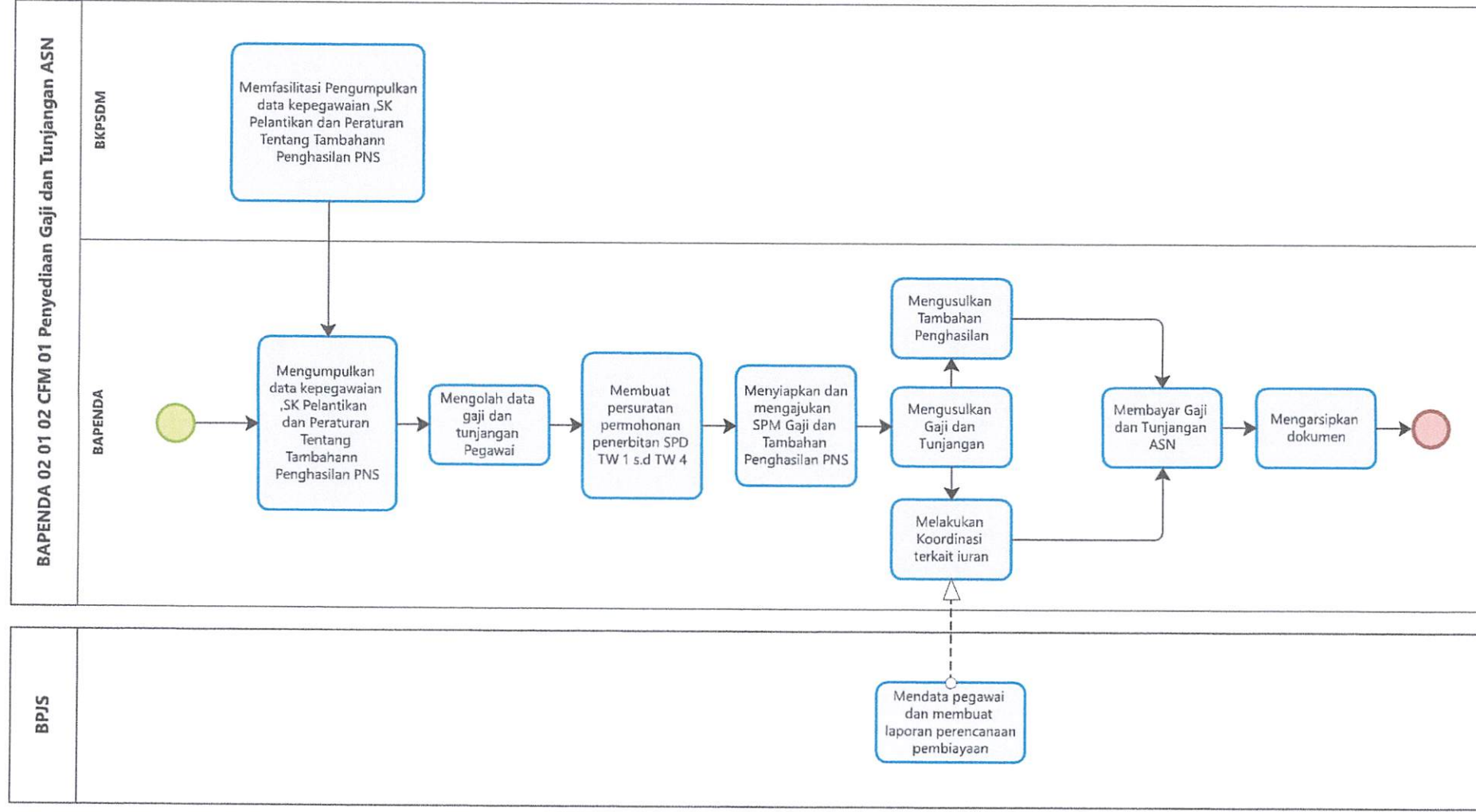
Bapelitbangda







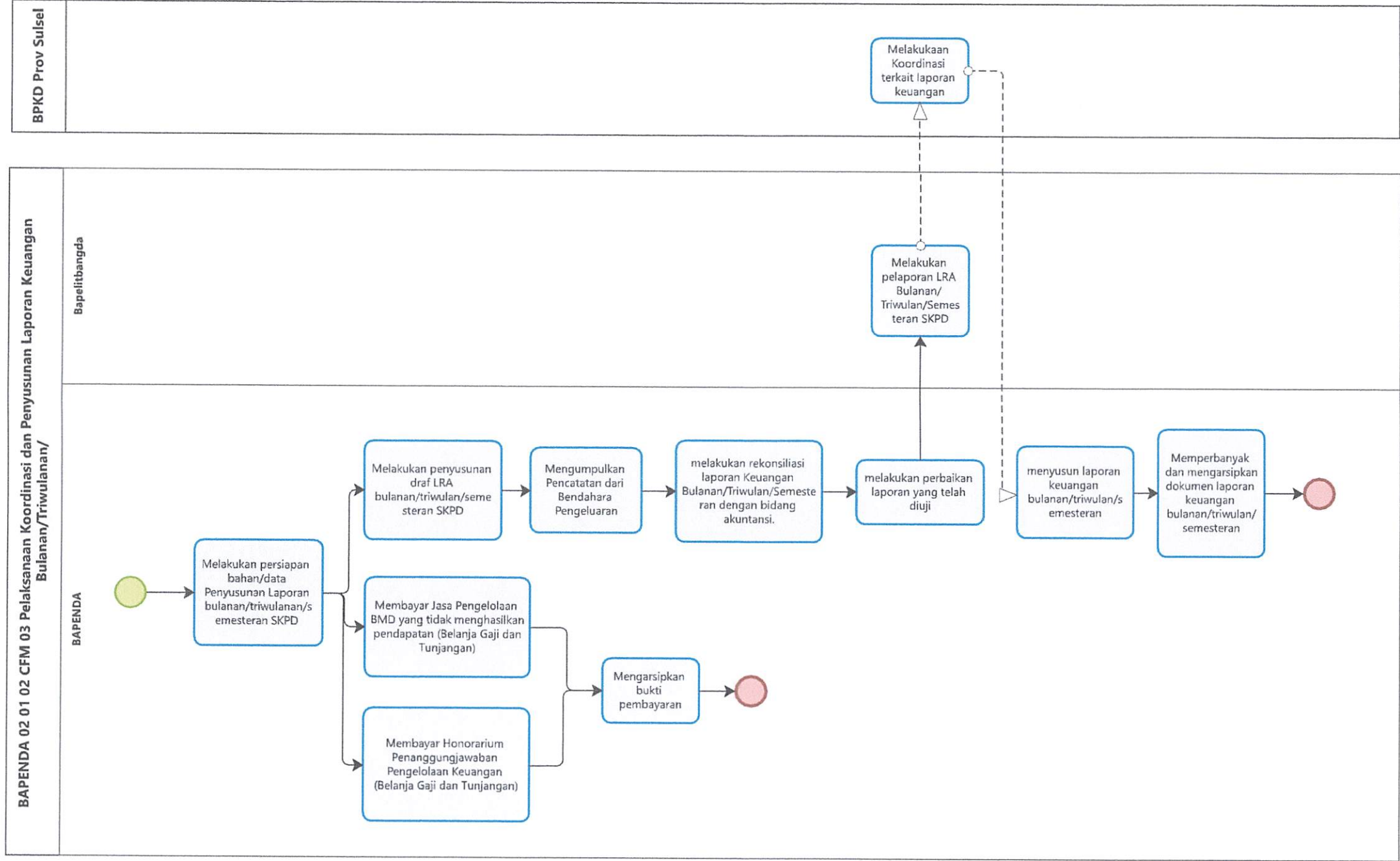




BAPENDA 02 01 02 CFM 02 Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

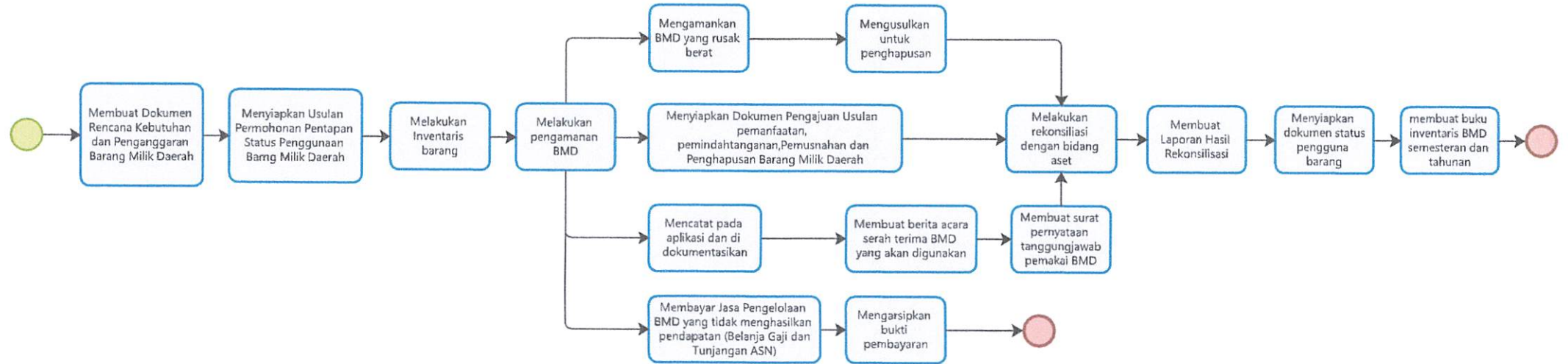
BAPENDA





BAPENDA 02 01 03 CFM 01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

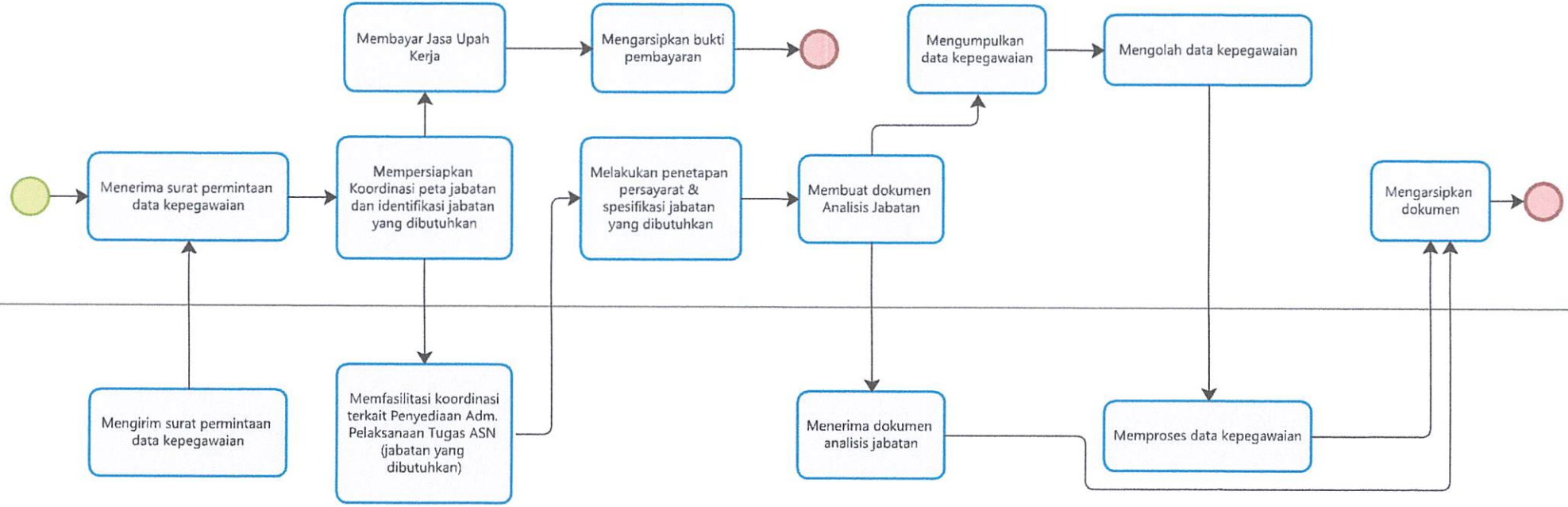
BAPENDA



BAPENDA 02 01 04 CFM 01 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

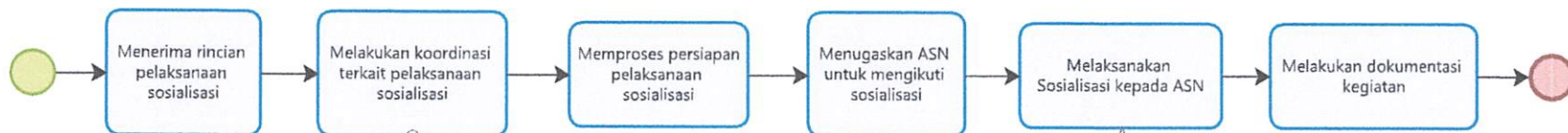
BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda

BAPENDA



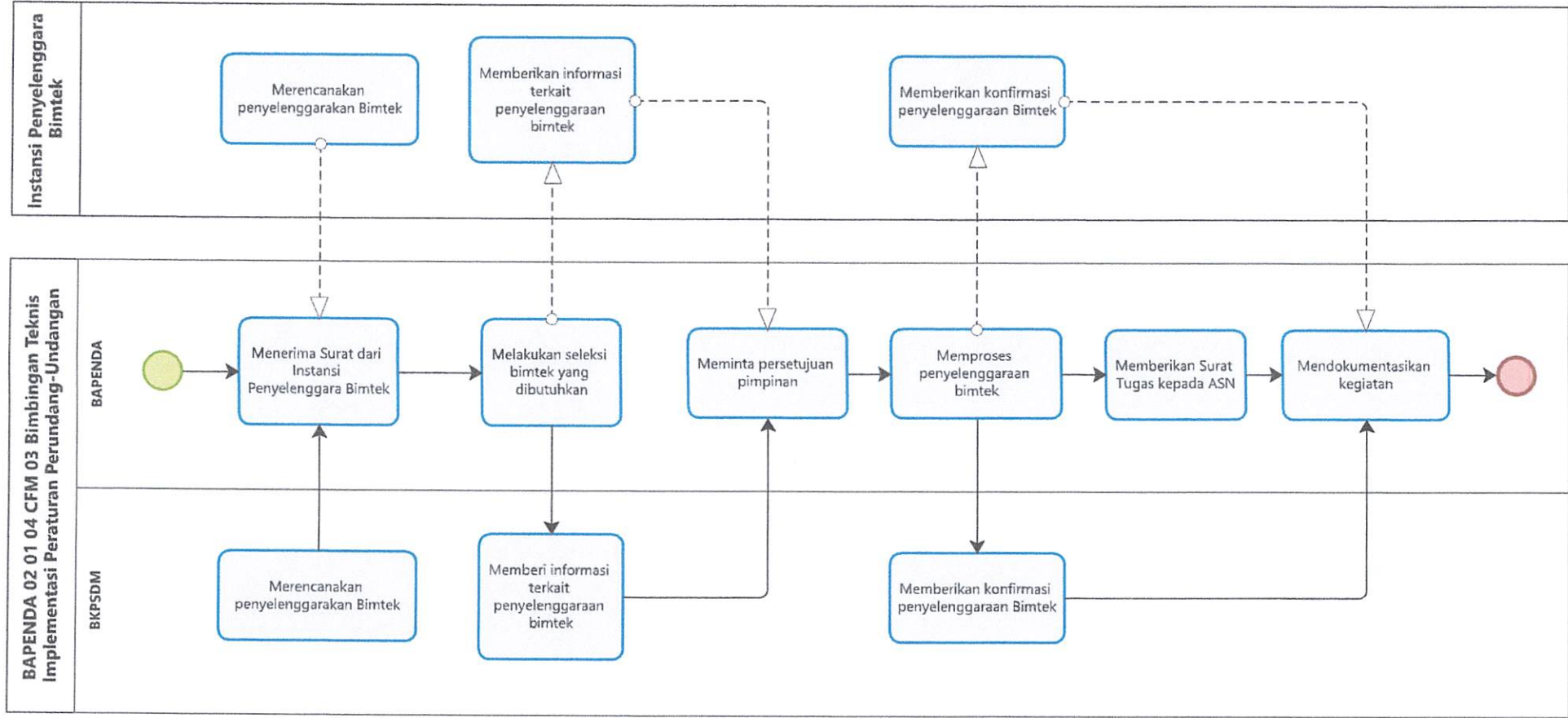
BAPENDA 02 01 04 CFM 10 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

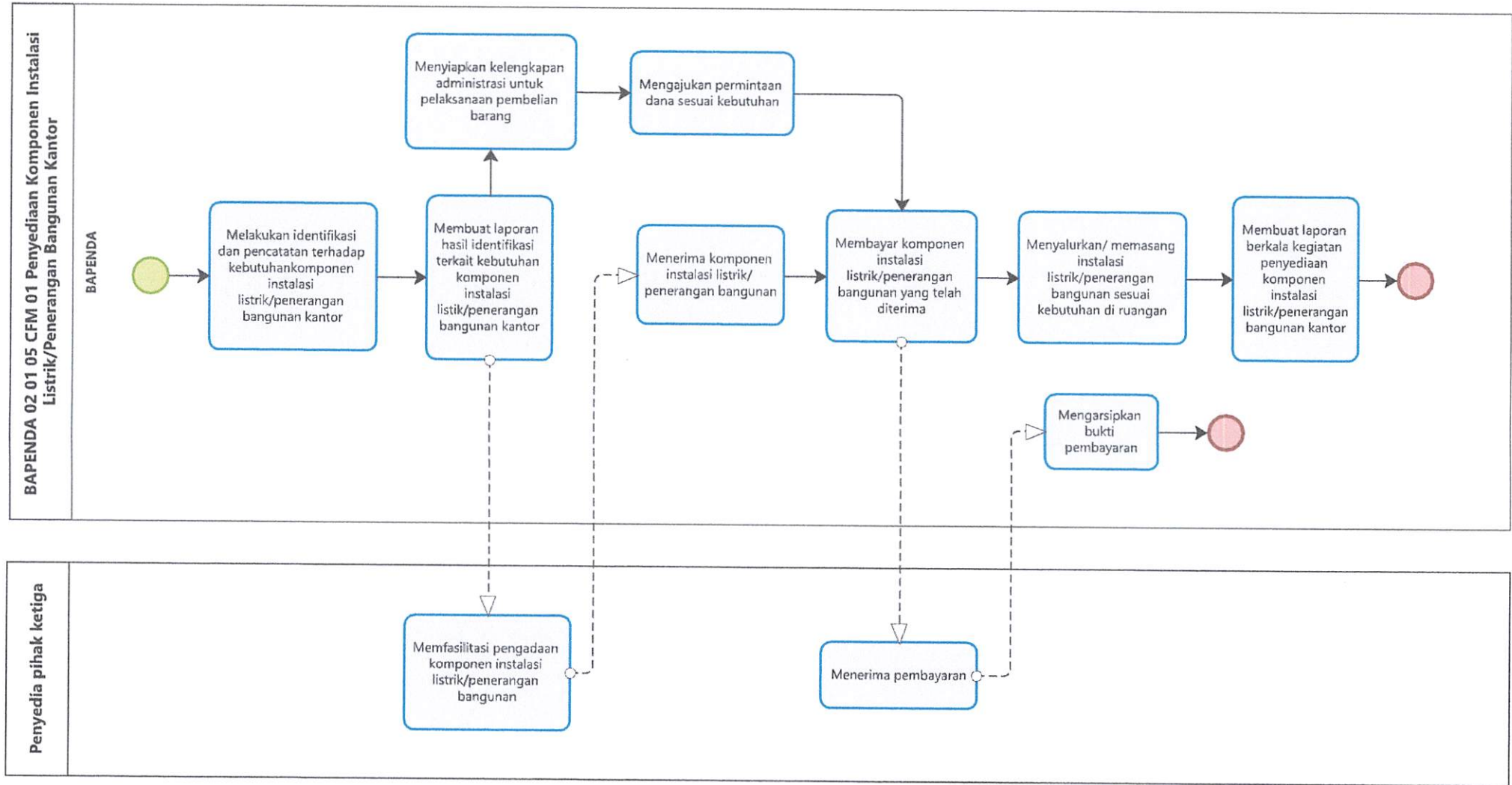
BAPENDA

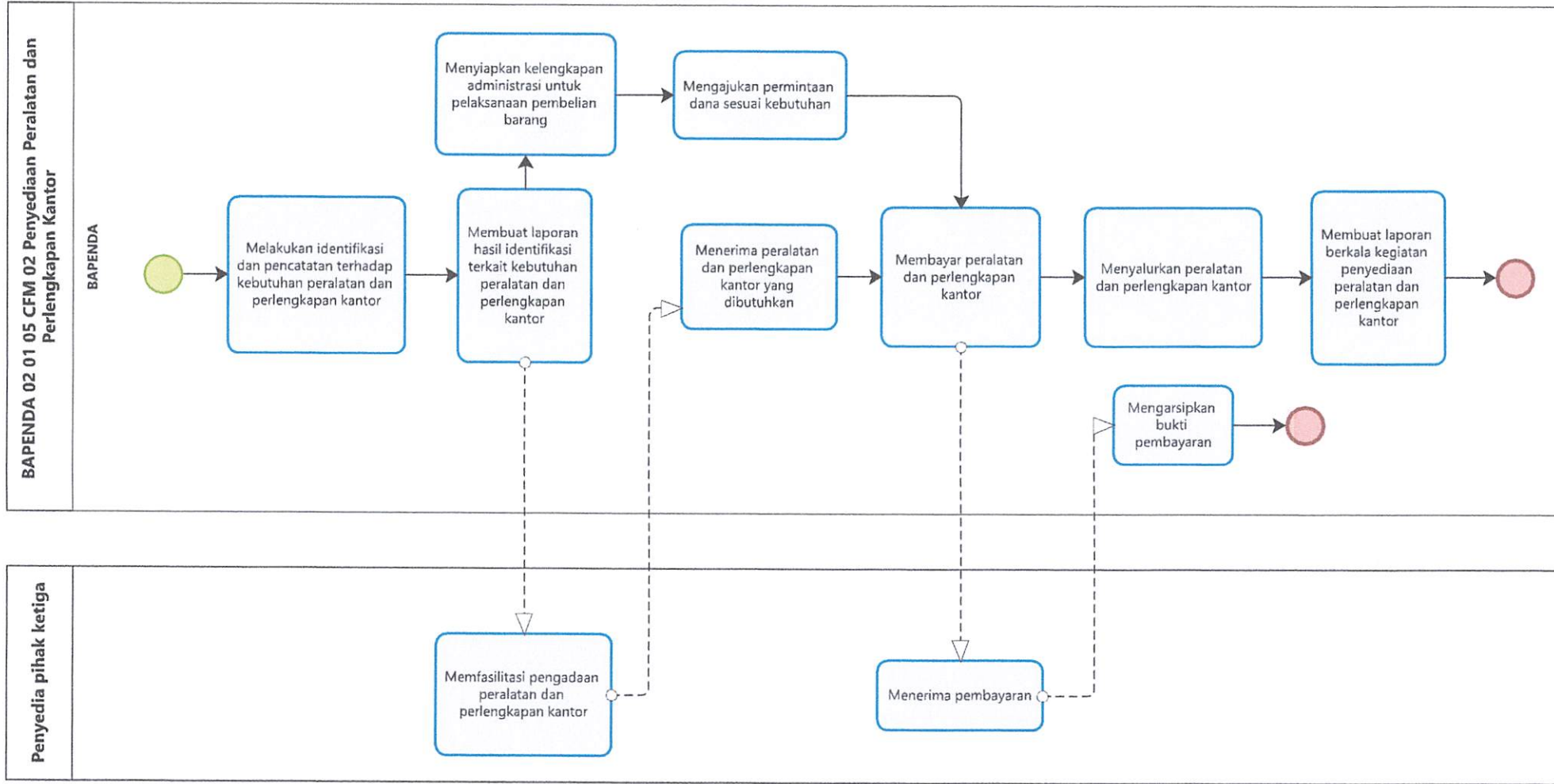


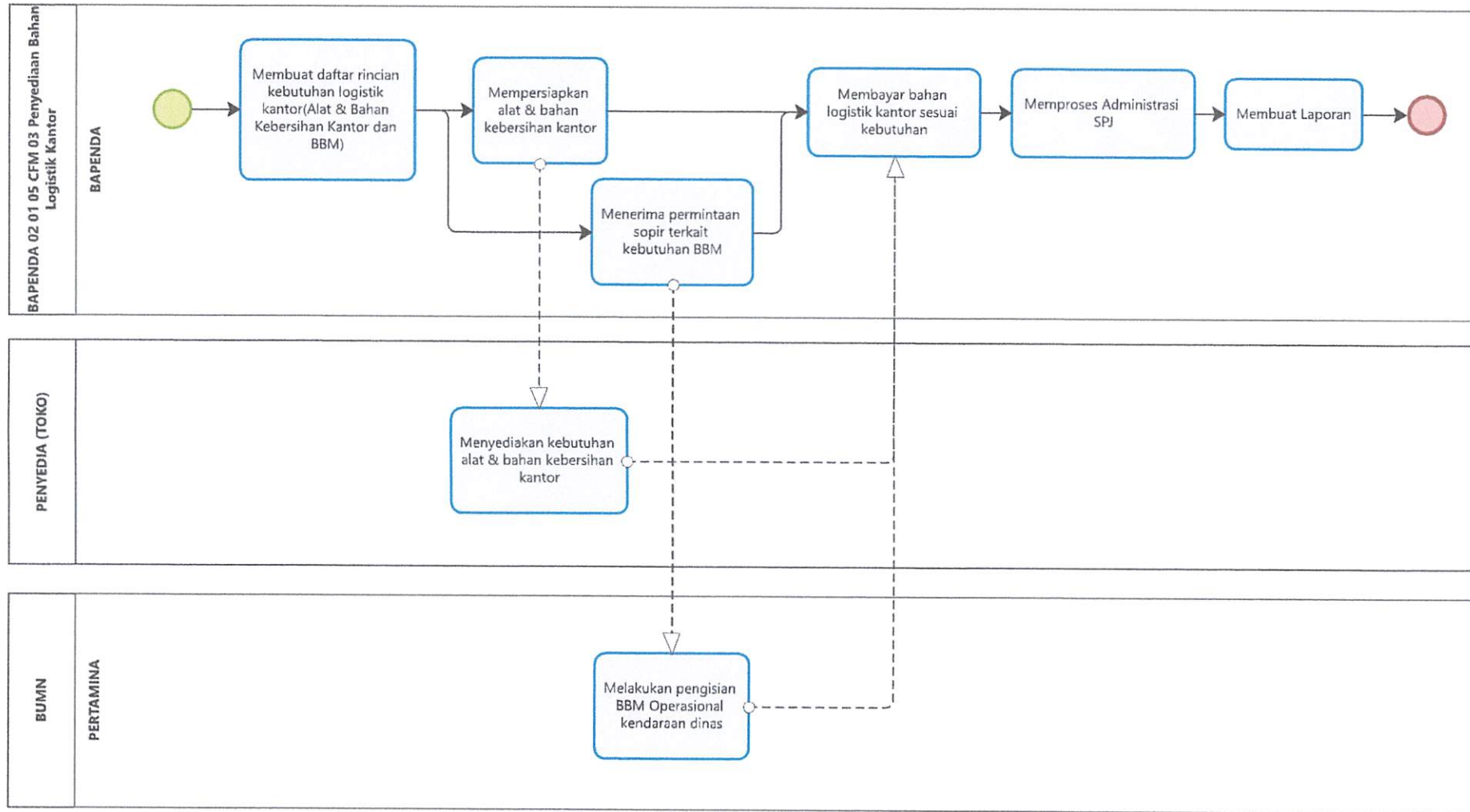
Narasumber

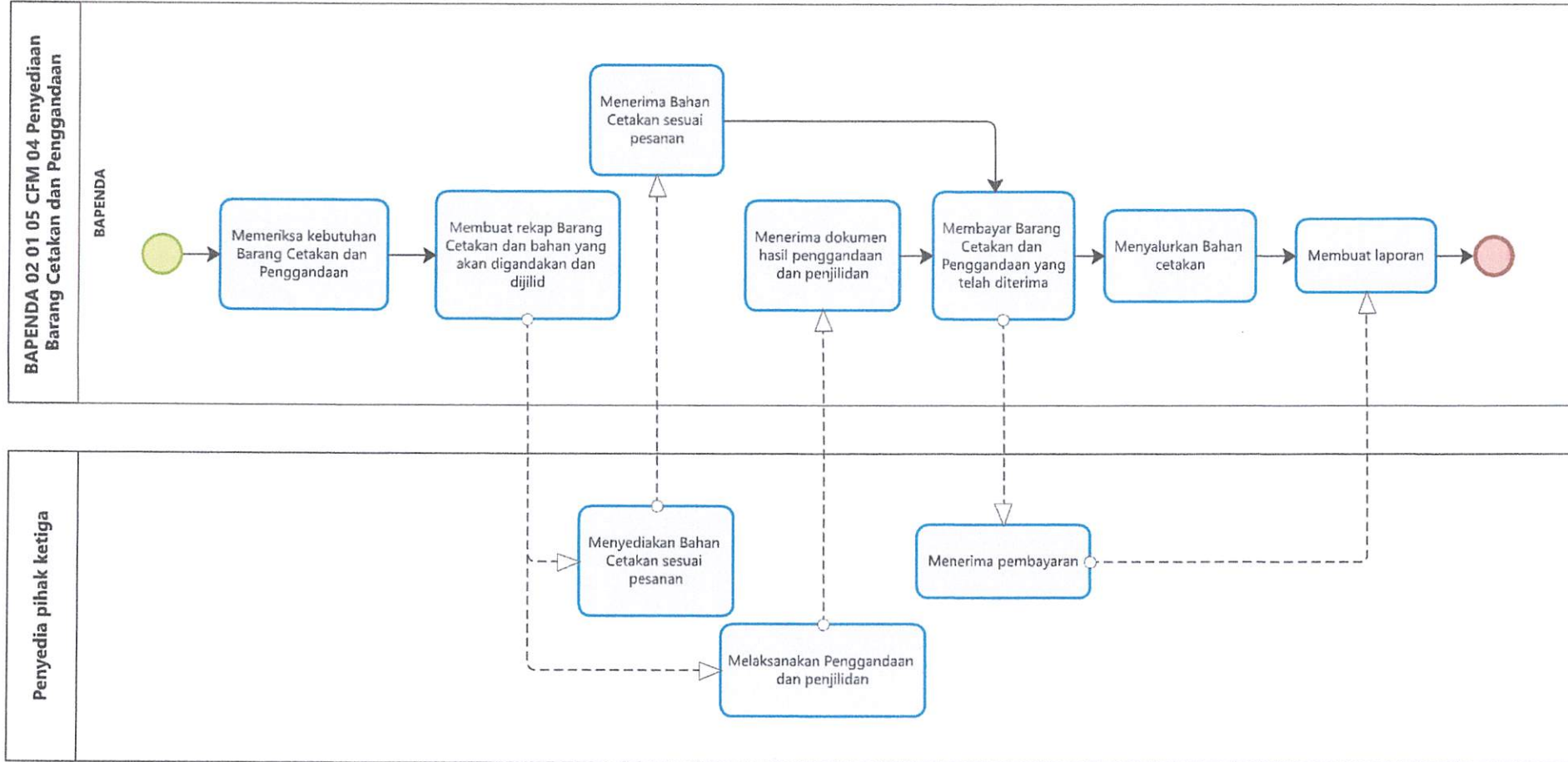
Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi

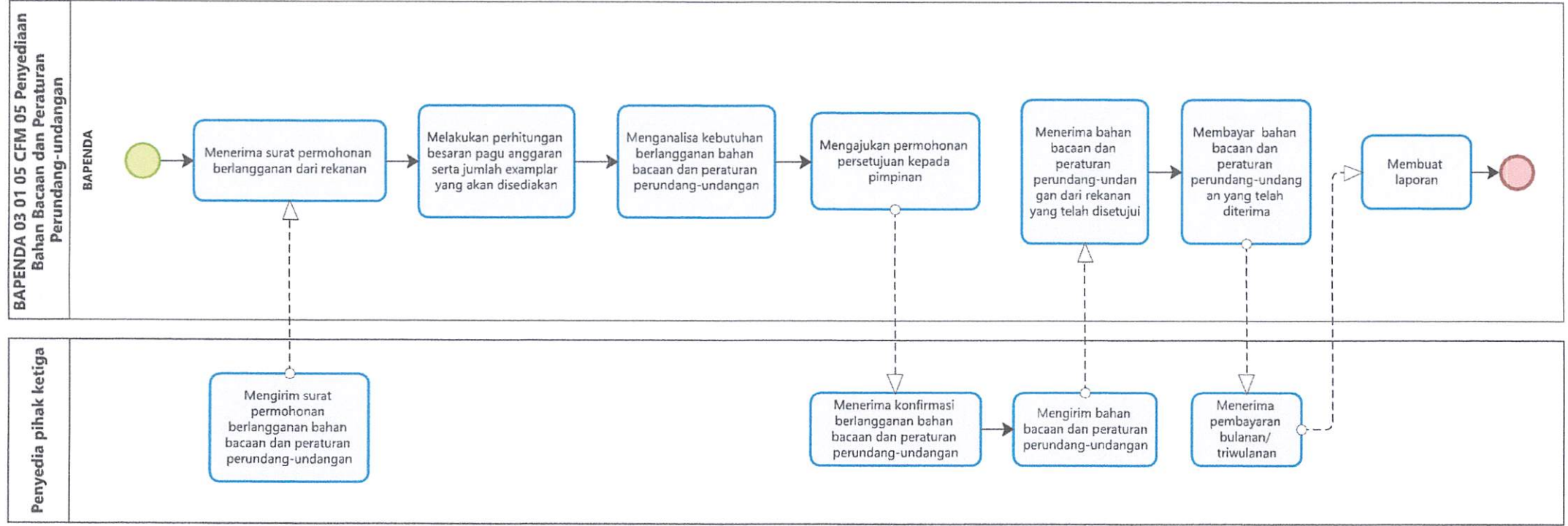


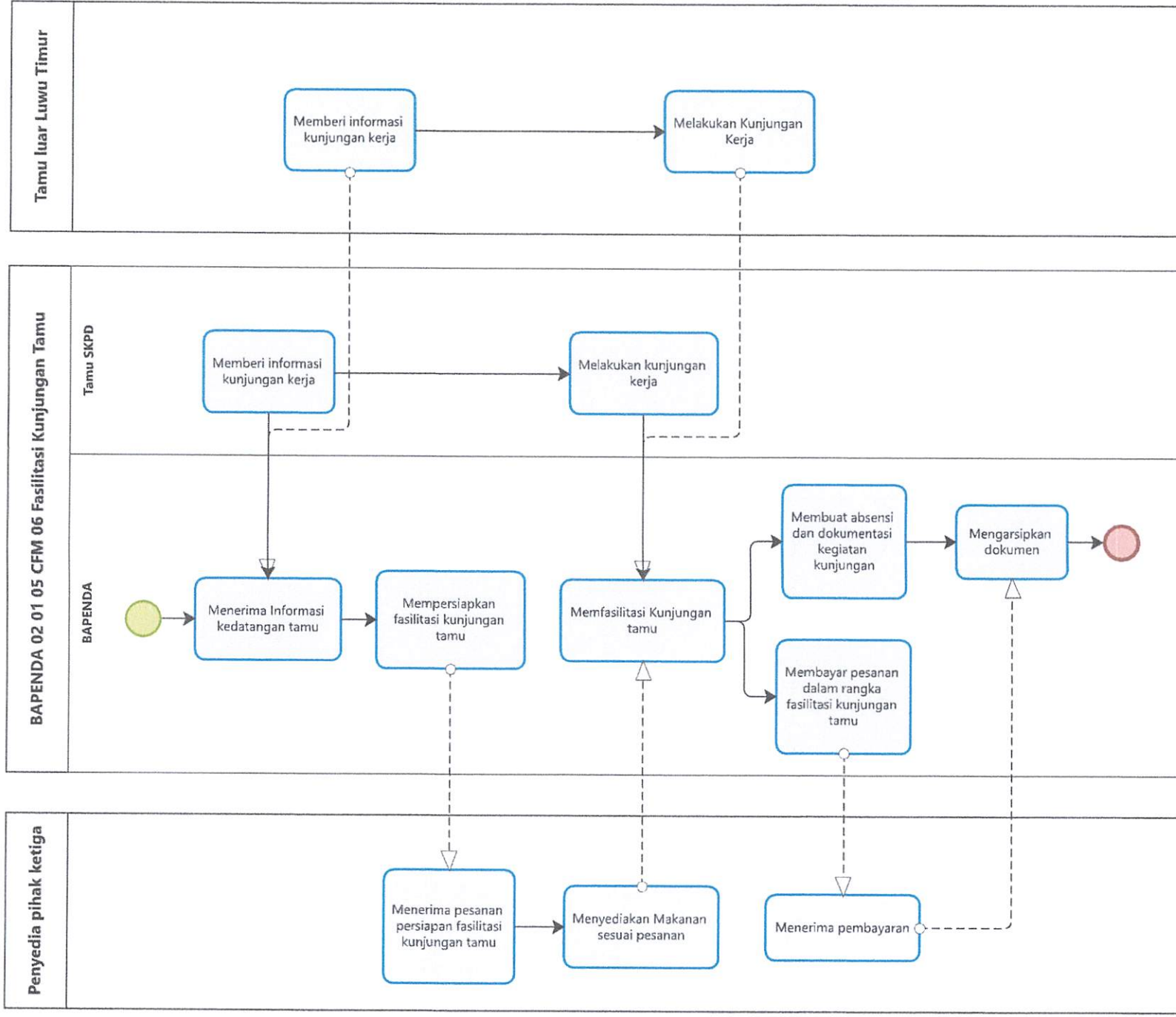












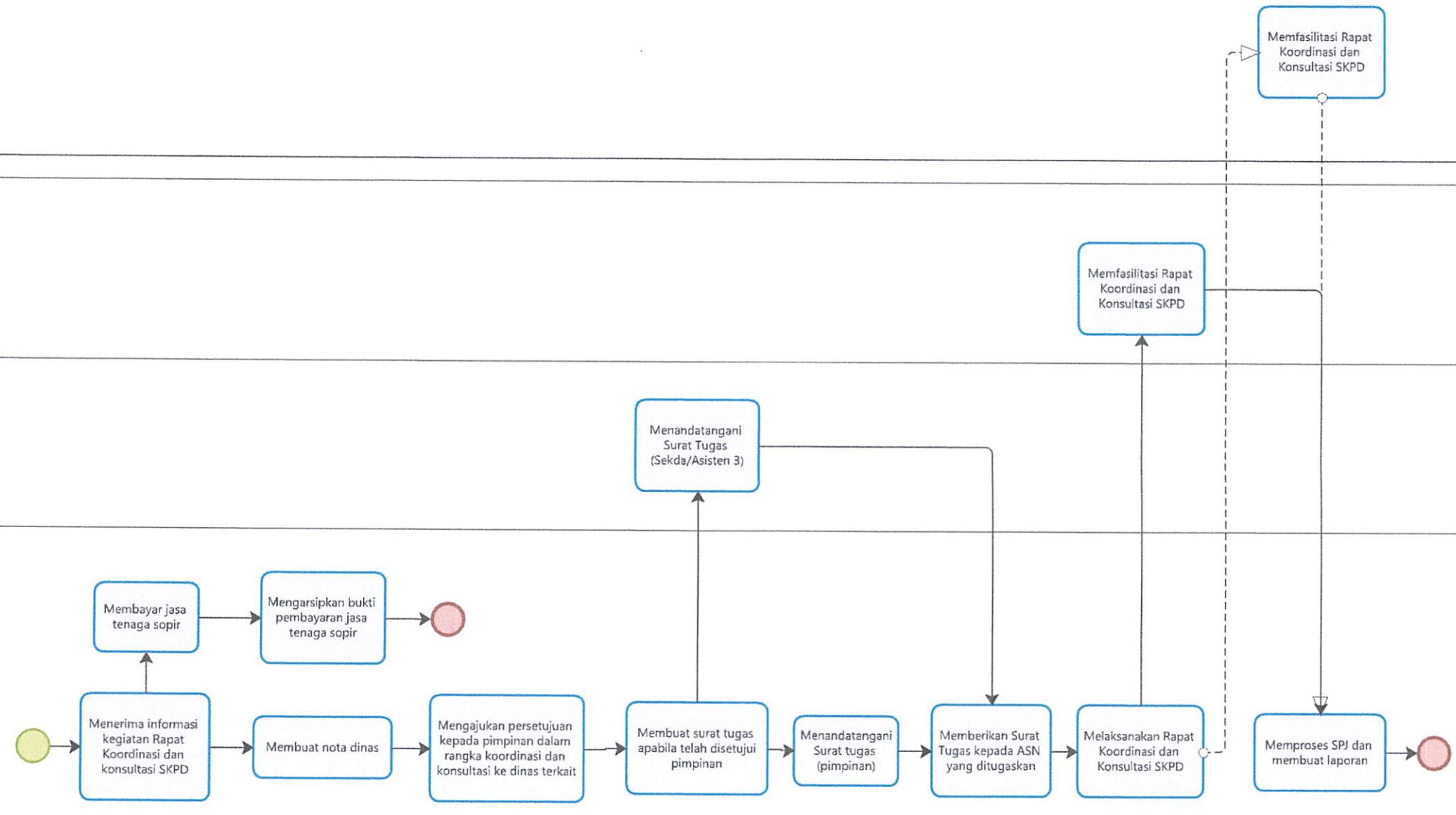
BAPENDA 02 01 05 CFM 07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

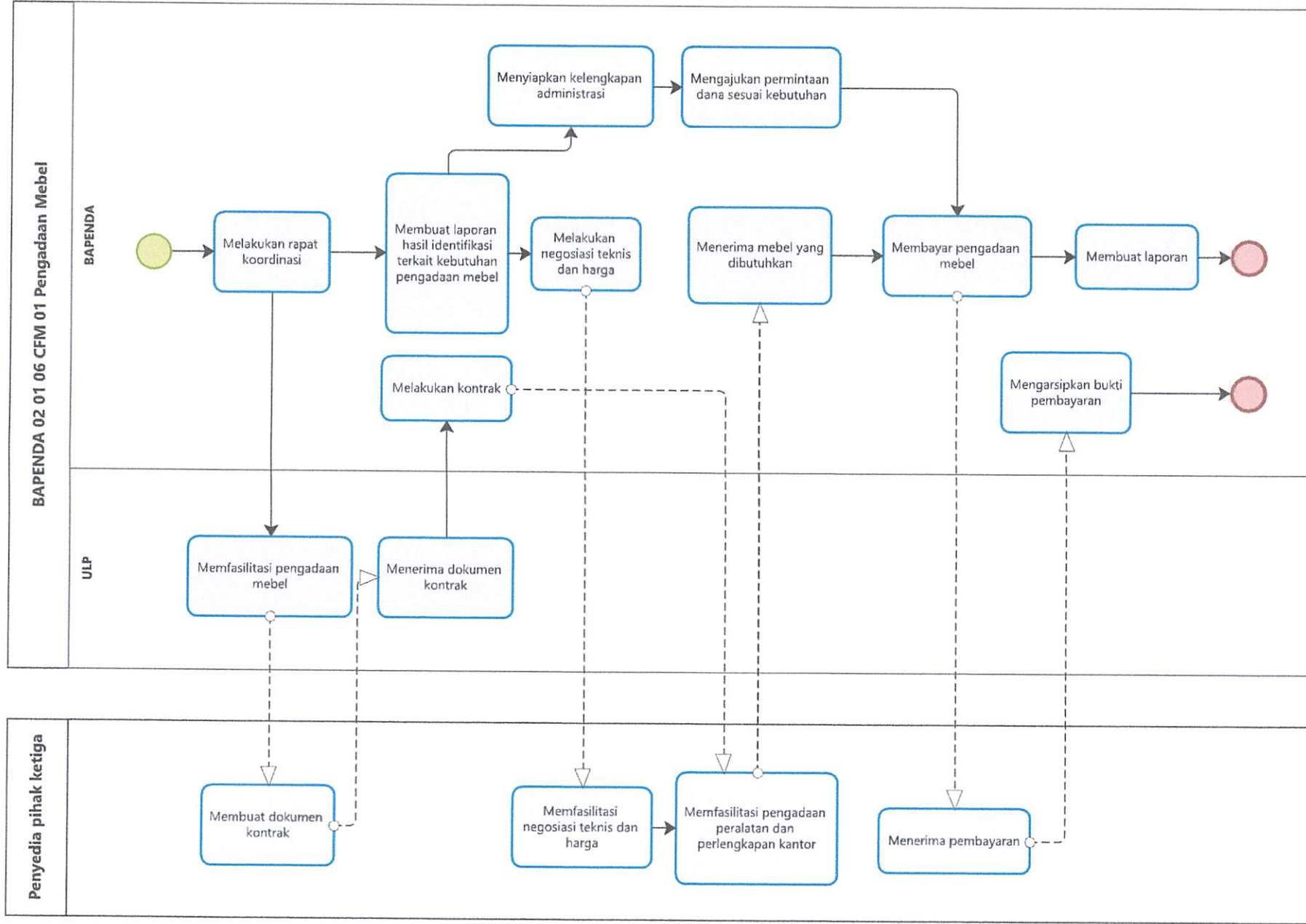
BAPENDA

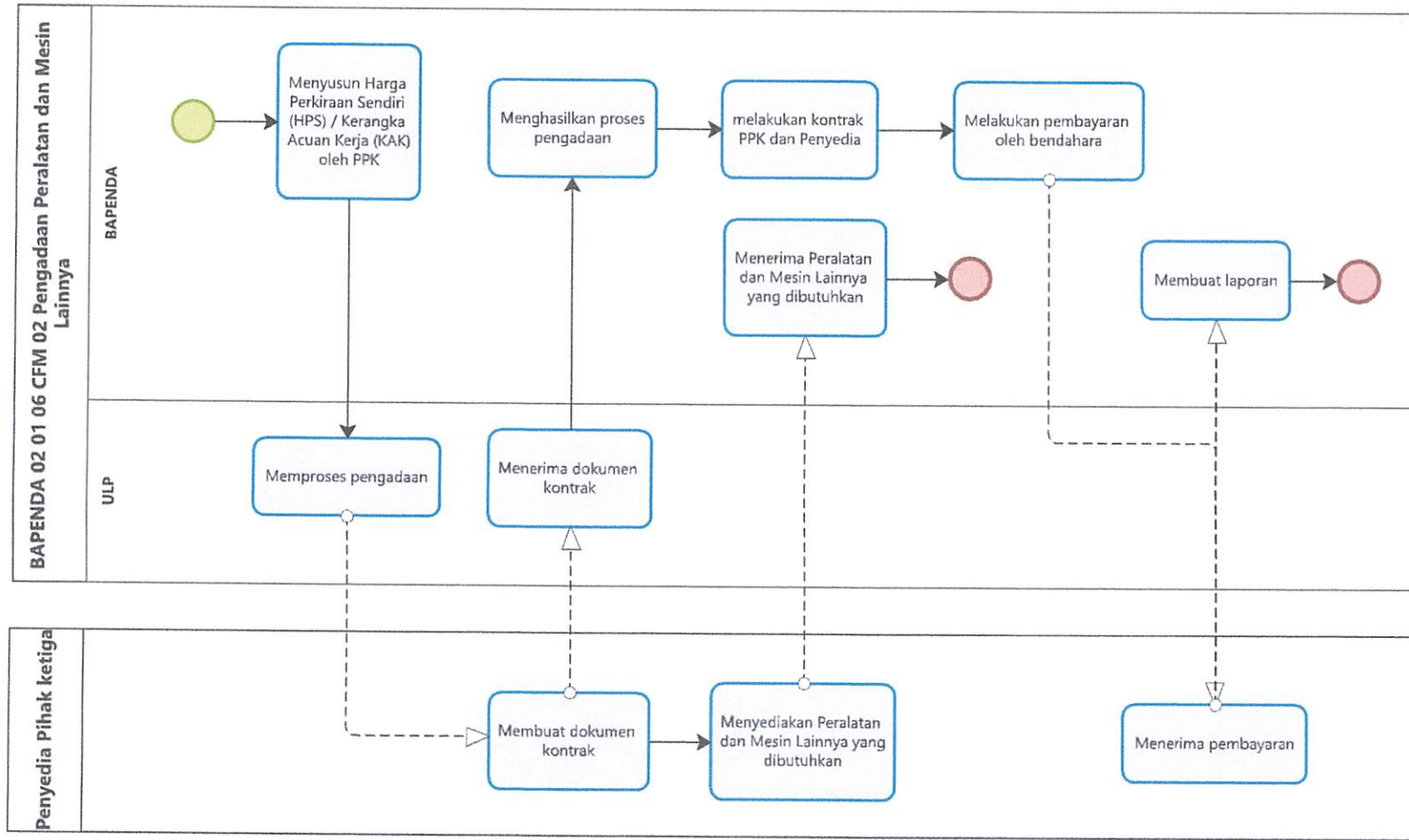
Sekretariat daerah

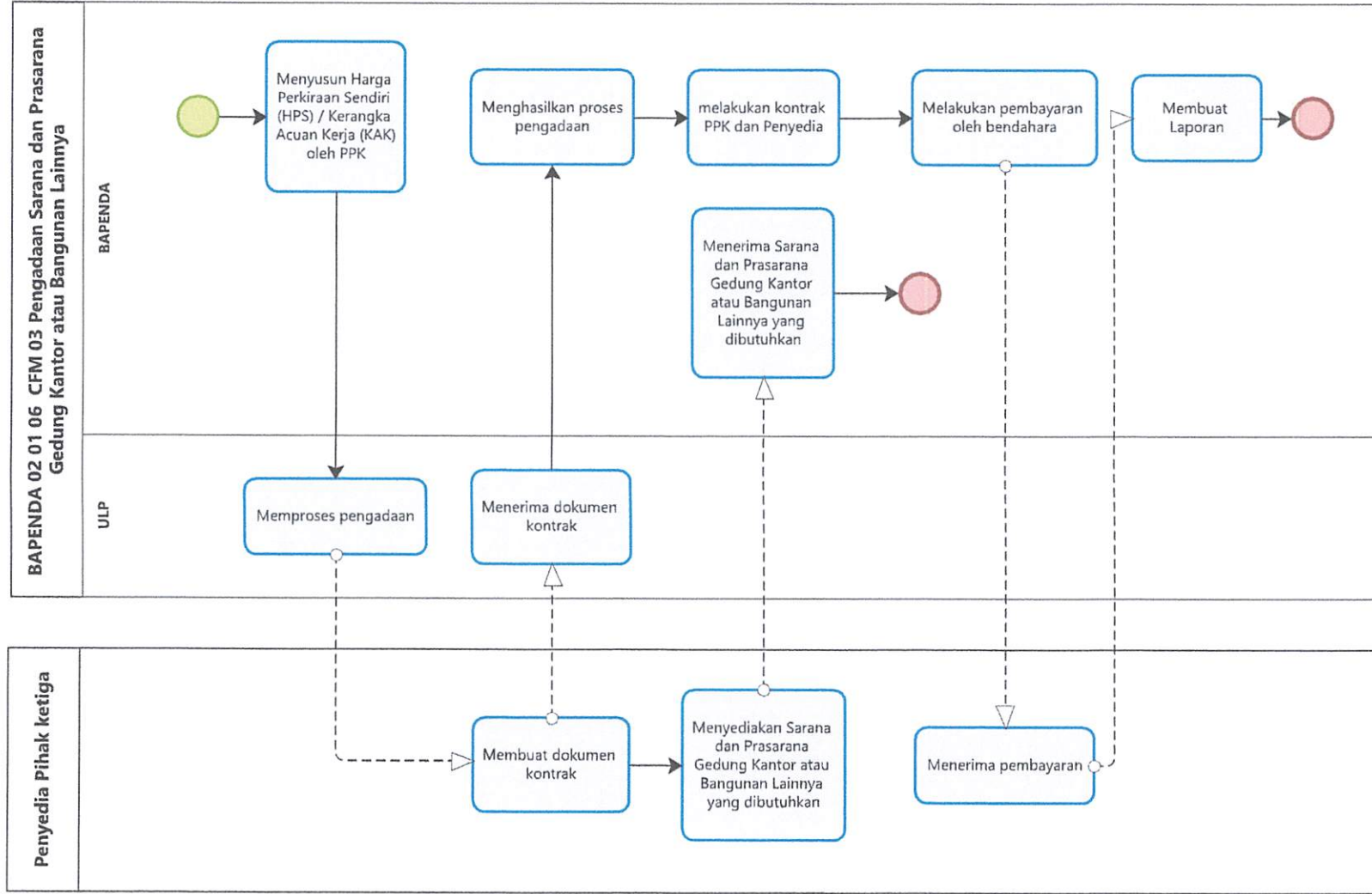
Kecamatan/Desa/Perusahaan

Kementerian/Dalam Provinsi/Luar Provinsi



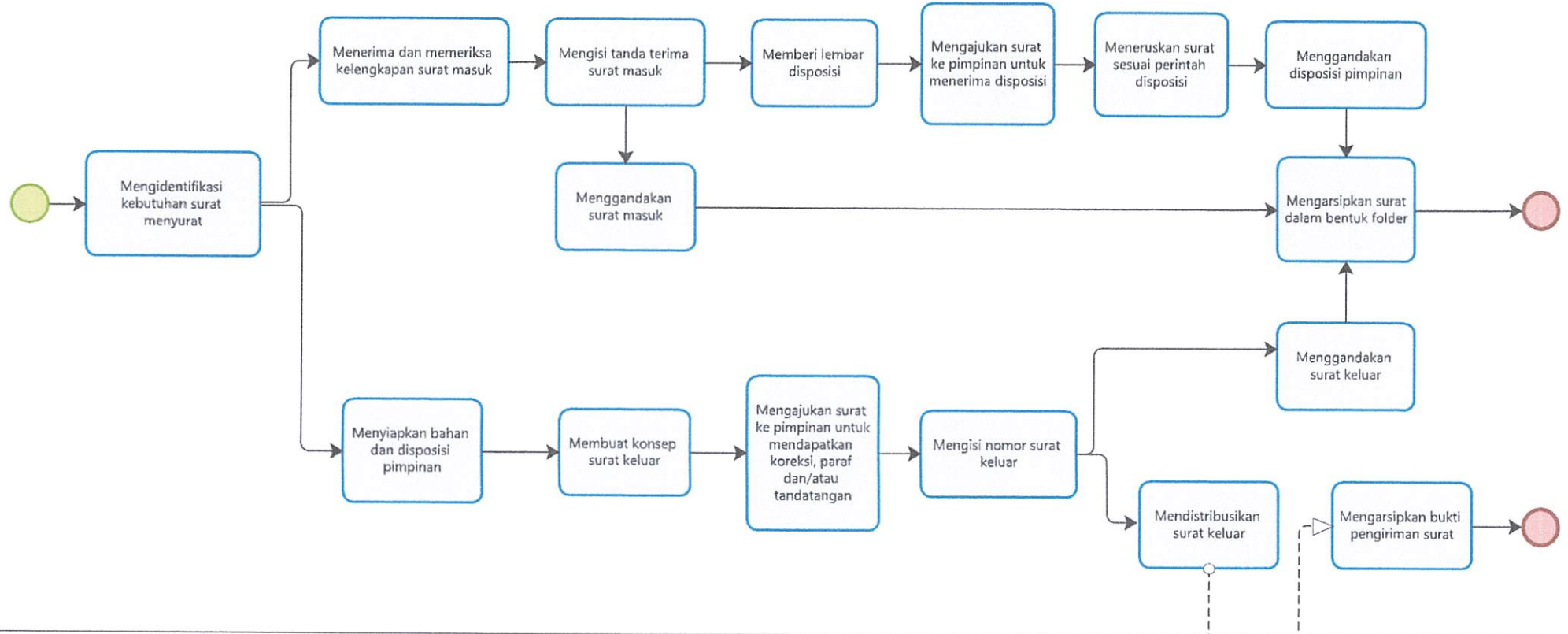




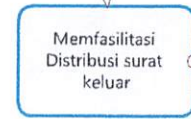


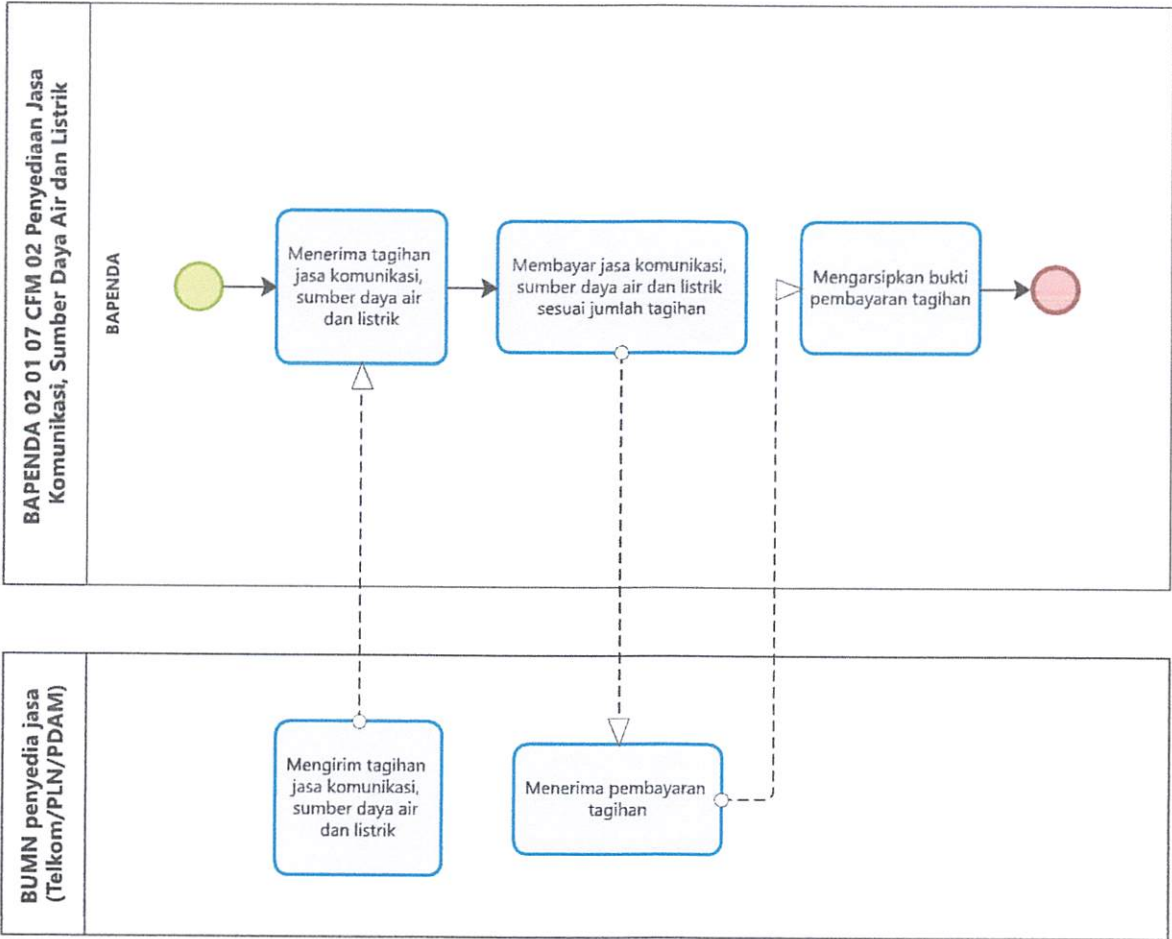
BAPENDA 02 01 07 CFM 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

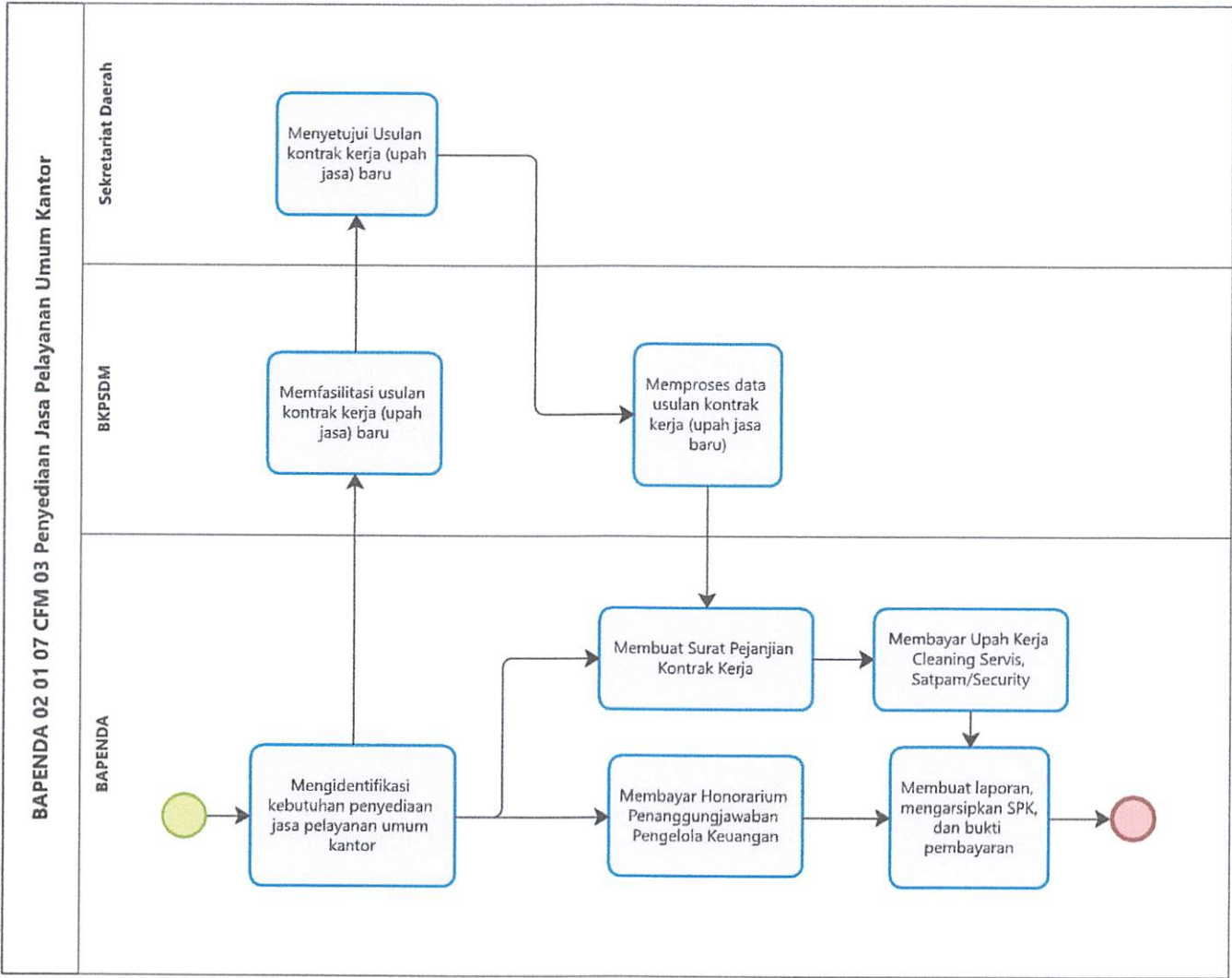
BAPENDA

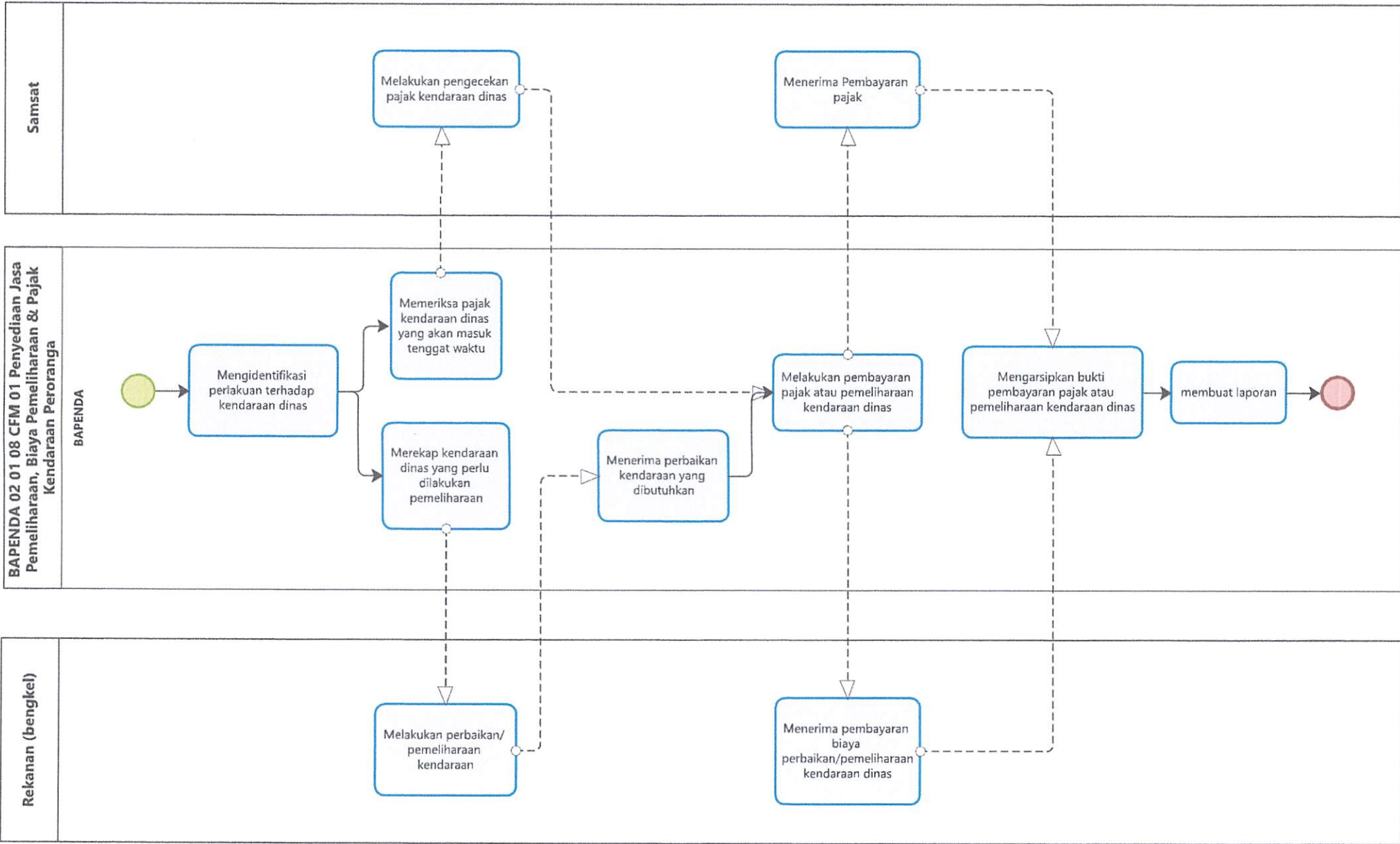


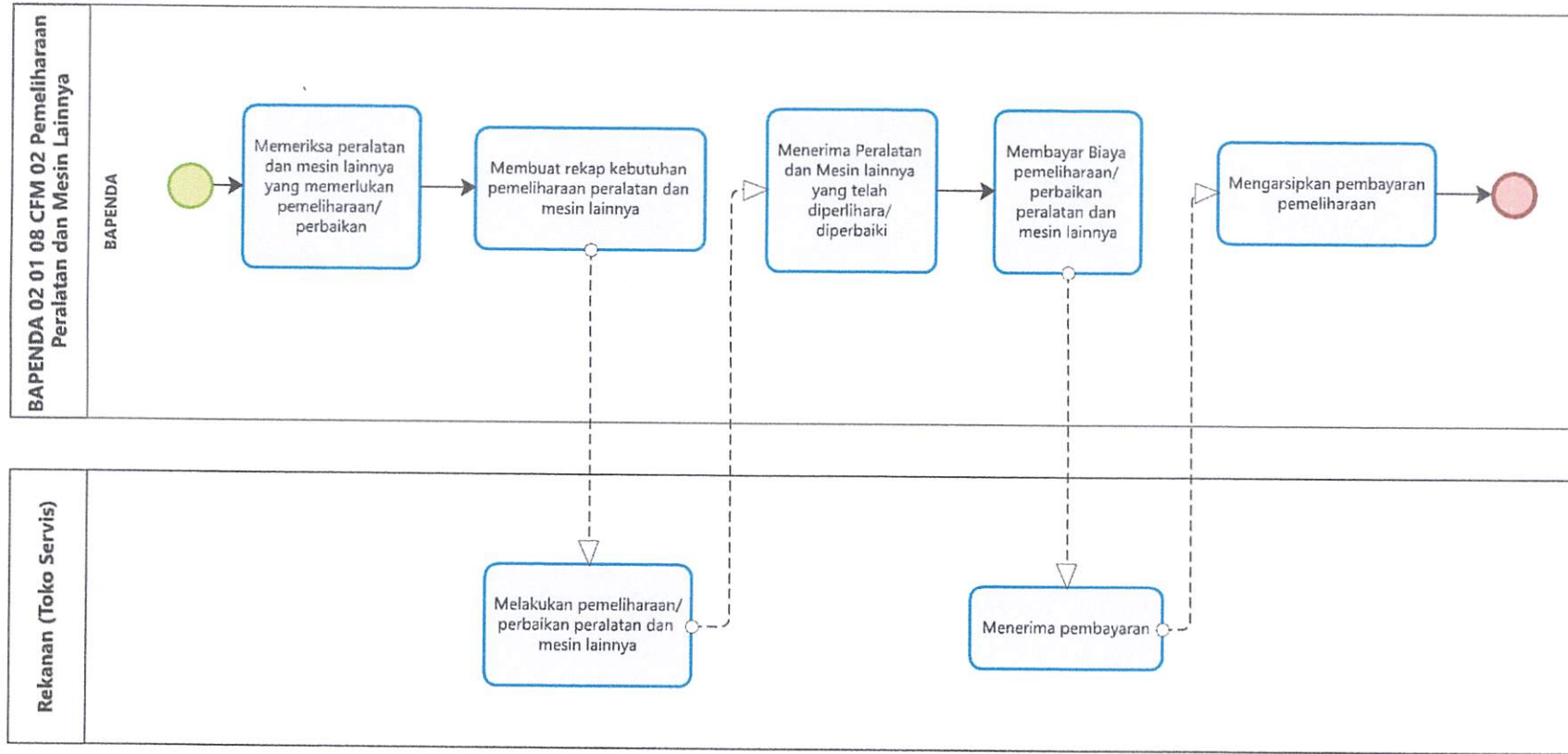
Jasa Pengiriman

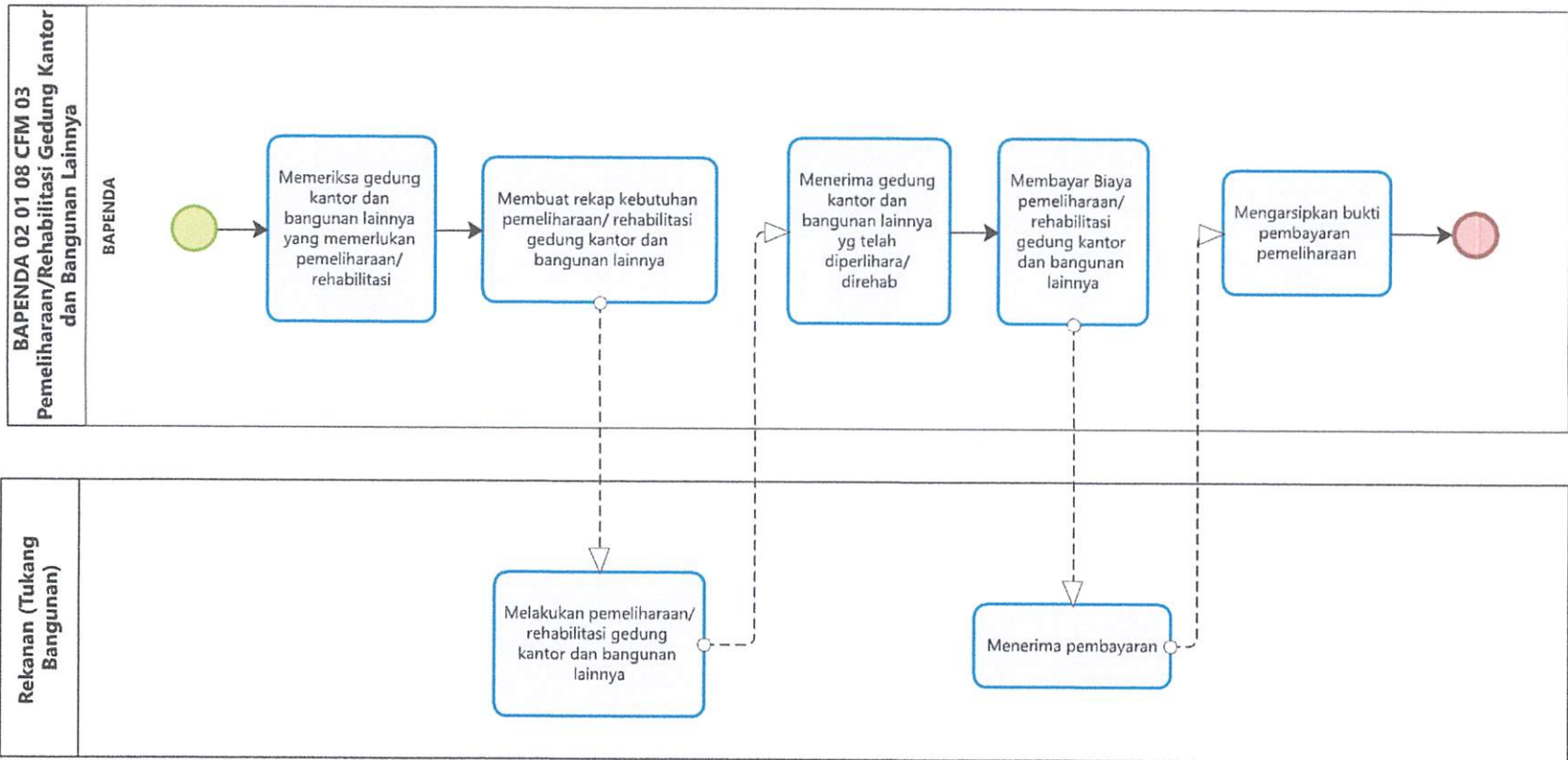












Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700814 200212 1 006